

**EVALUASI PROGRAM PENDUKUNG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)
DI KABUPATEN KLATEN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh :

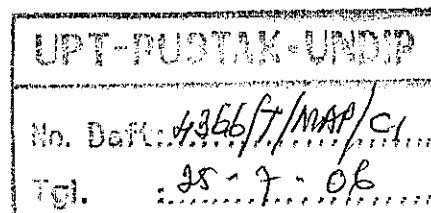
MUH. MUJAB

D4E 003063

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2005

i



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis.

Sehlarang, Agustus 2005



M.H. MUJAB

**EVALUASI PROGRAM PENDUKUNG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)
DI KABUPATEN KLATEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh
MUH. MUJAB
D4E 003063

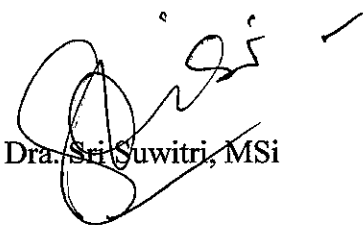
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 6 Agustus 2005
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji



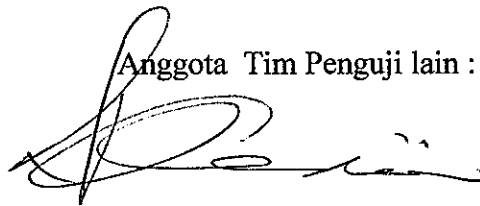
Dra. Endang Larasati, MS

Sekretaris Penguji

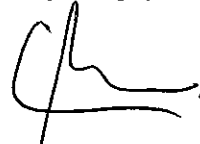


Dra. Sri Suwitri, MSi

Anggota Tim Penguji lain :



1. Drs. Wahyu Pujoyono, SU



2. Drs. Herbasuki NC, MT

Tesis ini telah diterima sebagai persayaratan
Untuk memperoleh gelas Magister Sain

Tanggal :

Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro



Prof. Drs Y Warella, MPA, PhD

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis telah bisa menyelesaikan tesis ini, tanpa karuniaMu penulis mungkin tidak bisa menyelesaikannya, tesis ini merupakan karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Program Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang telah menugaskan penulis untuk melanjutkan kuliah Jenjang S2 pada Program Magister Administrasi Publik di Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs Y Warella, MPA, PhD, Ketua Program Magister Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan Kuliah pada Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan Kuliah pada Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Dra. Endang Larasati, MS selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesainya tesis ini.
6. Ibu Dra. Sri Suwitri, MSi selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesainya tesis ini.

7. Kepala Bappeda Kabupaten Klaten yang telah memberikan informasi, data dalam penyusunan tesis ini.
8. Anak dan Istri kami yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulisan tesis ini bisa selesai.
9. Teman-teman pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah yang juga telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulisan tesis ini bisa selesai.
10. Teman-teman Kuliah Angkatan XI Program Magister Administrasi Publik telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulisan tesis ini bisa selesai.
11. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal atas jasanya dalam memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca, Senantiasa penulis terima dengan lapang dada serta mengucapkan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan ada manfaatnya.

Semarang, Agustus 2005

PENULIS

RINGKASAN

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan otonomi daerah serta membantu percepatan pemulihan dampak krisis, dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat pada semua tahapan pembangunan yang meliputi tahap pemilihan, perumusan, dan pelaksanaan program pembangunan.

Secara Umum penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten di titik beratkan pada Pelaksanaan Program P2MPD, Analisa Penelitian di fokuskan pada pelaksanaan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang ditimbulkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Fokus penelitian mencari solusi terbaik dalam hal penanggulangan kemiskinan yang terbaik tanpa mengesampingkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan, apabila terdapat hal-hal yang menghambat terciptanya efektifitas dalam program, dan solusi khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) pada evaluasi Program P2MPD Tahun Anggaran 2003, yang meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak Program P2MPD terhadap aspek-aspek ; peningkatan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi serta peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan.

Sebagai salah satu sasaran Pokok Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) warga miskin dan perempuan penerima manfaat yang sangat besar dengan dilibatkannya mereka secara langsung dalam proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta operasional pemeliharaan proyek pembangunan, hasil yang menonjol dalam pelaksanaan Program P2MPD bisa dilihat dari :

1. Semakin tumbuh dan berkembangnya roda perekonomian yang telah ada, yang tentunya akan memberikan tambahnya pendapatan atau keuntungan bagi pelaku-pelakunya.
2. Semakin tingginya kesadaran memiliki dan melestarikan serta membangun diri masyarakat dan perangkat desa.
3. Pembelajaran pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat desa.
4. Pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat, ditunjukkan dalam penetapan penyewa fasilitas pasar beserta dana kompensasinya dilaksanakan secara terbuka, transparan dan fair. Keputusan penetapan organisasi pengelola pasar beserta anggota, serta AD/ART-nya juga dilakukan secara terbuka transparan dan fair.
5. Tersedianya sarana penghubung dua daerah yang terpisahkan oleh aliran sungai merupakan salah satu akses yang mempersingkat jalan masuk kesuatu wilayah.

6. Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintahan, dicirikan dengan dilaksanakan pendekatan partisipatif, perencanaan, monitoring dan evaluasi (PPME) untuk pembangunan prasarana melalui pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten, Semakin berdayanya masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Masyarakat lebih mudah dalam memberikan akses dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat lebih meningkat perekonomiannya.
8. Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum.
9. Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pembangunan, dicirikan adanya komunikasi dua arah antara kabupaten, Kecamatan, desa dengan masyarakat.
10. Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
11. Menguatnya kapasitas/kemampuan warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan.

ABSTRACT

The research purpose of the Supporting Program Evaluation on Society Empowerment and the Regional Government of Klaten Regency was to obtain the description of program supporting and obstructing factors and to obtain the description of the implementation impact of P2MPD program. The research focus looked for the best solution in handling poverty by considering public participation in development, when there is obstructing matters in creating program effectiveness and the solution in poverty handling. The research of Program Evaluation on Society Empowerment and Regional Government (P2MPD) in budgetary year of 2003 covered the supporting and obstructing factors and the impact of P2MPD Program on the aspects; Enhancing the supporting facilities for social and economic activities and public participation in development.

The methodology to obtain the description of supporting and obstructing factors on P2MPD Evaluation Program in Klaten Regency, the writer collected data from the input and output of Regency Coordination Team (TKK). Whereas, the impact of P2MPD Program Implementation explored information from society and village administrators as the program target.

From the research result of the Supporting Program Evaluation on Society Empowerment and the Regional Government (P2MPD) in Klaten Regency was a concrete step of Center Government in regional society empowerment, and accelerating recovery of crisis impact. The result of P2MPD Program can be seen from several indicators; **Goal Achievement Indicator**, that is, supporting government's decentralization efforts, the implementation of the recipient village to receive P2MPD Funds by Klaten Regency Government by accommodating society, executive, and legislative. **Purpose Achievement Indicator**, that is, increasing government's capacity to provide public facilities, promoting information and development transparency. **Result Achievement Indicator**, that is, empowering people in villages and in the regency to participate in regional development.

ABSTRAKSI

Tujuan Penelitian Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten adalah untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat Program serta memperoleh gambaran dampak pelaksanaan program P2MPD. Fokus penelitian mencari solusi terbaik dalam hal penanggulangan kemiskinan yang terbaik tanpa mengesampingkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan, apabila terdapat hal-hal yang menghambat terciptanya efektifitas dalam program, dan solusi yang khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) pada evaluasi Program P2MPD Tahun Anggaran 2003, yang meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak Program P2MPD terhadap aspek-aspek; peningkatan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi serta peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan.

Metodologi untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat evaluasi Program P2MPD di Kabupaten Klaten penulis mengumpulkan data dari masukan dan pengeluaran dari Tim Koordinasi Kabupaten (TKK), sedangkan dampak dari pelaksanaan Program P2MPD menggali informasi dari masyarakat dan aparat desa sebagai sasaran program.

Dari hasil penelitian Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ini merupakan langkah konkret dari pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, serta mempercepat pemulihan dampak krisis, Hasil Program P2MPD bisa dilihat dari beberapa indikator ; *Indikator pencapaian tujuan* yaitu ; terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintah, ditunjukkan dengan dilaksanakannya proses penentuan desa penerima dana P2MPD oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mengakomodir masyarakat, eksekutif dan legislatif. *Indikator pencapaian maksud* yaitu; *pertama* Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum, *kedua* meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam hal pembangunan. *Indikator Pencapaian Hasil* yaitu semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	
1. Identifikasi Masalah	16
2. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori / Pengkajian Teoritis	19
B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program.....	40
C. Dampak Program	42

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Perspektif Pendekatan Penelitian	44
	B. Fokus Penelitian	46
	C. Pemilihan Informan	47
	D. Instrumen Penelitian	47
	E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	48
	F. Analisa Data	49
 BAB IV	 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
	A. Diskripsi Wilayah Penelitian	
	1. Kondisi Sosial	50
	2. Kondisi Ekonomi	53
	3. Kondisi Sektor Industri dan Perdagangan	55
	4. Kondisi Fisik Prasarana	56
	5. Arah dan Kebijakan	60
	B. Hasil Penelitian	
	1. Masukan (<i>Inputs</i>)	62
	2. Keluaran (<i>Outputs</i>)	70
	3. Hasil (<i>Outcomes</i>)	88
	4. Manfaat (<i>Benefits</i>)	91
	C. Analisis Hasil Penelitian	93
	D. Diskusi	105
 BAB V	 : SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	112
	B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin dan Presentasi Penduduk Miskin Di Jawa Tengah	6
2. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1	51
3. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
4. Sarana Kesehatan	53
5. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	54
6. Perkembangan PDRB Perkapita	54
7. Perkembangan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja	55
8. Perkembangan Investasi dan Nilai Produksi	56
9. Perkembangan Prasarana Jalan Kabupaten Klaten	57
10. Perkembangan Jumlah Prasaran Jembatan di Kabupaten Klaten	58
11. Prasarana Pengairan dan Areal yang diairi di Kabupaten Klaten	59
12. Jadwal Sosialisasi Kecamatan	72
13. Kontribusi Masyarakat dengan Dana P2MPD di Kabupaten Klaten	87

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Persyaratan Kelayakan Program	20
2. Bagan Pelaksana P2MPD di Desa	65

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pedoman Wawancara atau data	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Goncangan ekonomi yang melanda Indonesia sangat parah, dimana krisis ekonomi memberikan konsekuensi sosial dan politik yang sangat besar. Dampak sosial dan ekonomi meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan jumlah penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari jutaan orang, dan ancaman terhadap kerusuhan sosial sangat mengganggu laju pertumbuhan bangsa Indonesia, diperlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kondisi perekonomian khususnya pada masyarakat rentan. Pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi penderitaan kelompok masyarakat rentan dan menjaga keutuhan sosial dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang pemerintah juga melakukan upaya pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, baik kemiskinan tradisional maupun yang disebabkan oleh krisis.

Krisis ekonomi tersebut telah memperkuat kesadaran akan pentingnya perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat, sehingga komplemen dan pendukung dari perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, pembangunan prasarana dan sarana dasar menjadi sangat menentukan keberhasilan dari program-program tersebut. Menyadari hal itu, pemerintah pusat berinisiatif untuk membantu pemerintah daerah dengan memberikan dana langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk keperluan pembangunan prasarana dan sarana dasar tersebut.

Berbagai usaha dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia telah dilakukan, namun satu kenyataan belum juga memberikan hasil yang memuaskan. Kondisi ekonomi dan politik kita masih belum banyak berubah, kematian bayi lantaran kurang gizi, pengangguran, mencapai 15 juta orang akibat PHK., dan pengangguran mencapai 70 % angkatan kerja. Kemiskinan absolut yang sebelumnya 23 juta orang, kini diperkirakan mencapai 105 juta orang (55% penduduk) sama dengan situasi awal pembangunan. Inflasi mendekati 50 %, dan juga diwarnai kenaikan BBM dan listrik yang mengakibatkan instabilisasi psikologi massa, depresi, frustrasi, dan merosotnya daya beli masyarakat. Berbeda dengan negara-negara lain yang diterpa badai krisis ekonomi (Thailand, Korea Selatan Malaysia). Indonesia masih tertinggal dalam memulihkan kembali perekonomian nasional.

Menyadari besarnya krisis yang telah begitu mendalam dan mengarah kepada krisis regional dan global maka kita harus meneguhkan kembali paradigma pembangunan yang demokratis, yaitu proses pembangunan yang tertumpu pada rakyat banyak (*people centered development*). Pembangunan Pemberdayaan Manusia dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menempatkan masyarakat pada posisi sentral. Ini berarti masyarakat dipandang sebagai focus utama maupun sumber utama pembangunan. Masyarakat menjadi komplemen dan pendukung dari berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi masih tetap diperlukan, namun harus seiring dengan pemerataan, atau disebut *growth with equity*, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita naik, pengangguran mengecil, kemiskinan terkikis, dan kesenjangan pendapatan berkurang.

Sejak tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui paket berupa pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank telah mempersiapkan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Target Program P2MPD adalah mengembangkan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta mempersiapkan mereka dalam menjalankan peran dan wewenang baru yang dilimpahkan kepada daerah sehubungan dengan desentralisasi pemerintah melalui pembangunan prasarana dasar. Didalam program ini, masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan dengan metode partisipatif.

1. Tujuan Program P2MPD

a. Tujuan umum

Mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan otonomi daerah serta membantu percepatan pemulihan dampak krisis, dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat pada semua tahapan pembangunan yang meliputi tahap pemilihan, perumusan, dan pelaksanaan program pembangunan.

b. Tujuan khusus

- 1) Mendukung upaya desentralisasi pemerintah.
- 2) Memberdayakan masyarakat kelurahan atau desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, tata negara, pengawasan, akuntansi dan pelaporan pada tingkat kabupaten atau kota.

- 4) Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar.
- 5) Menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktifitas ekonomi pada tingkat lokal.
- 6) Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.

2. Sasaran Umum Program P2MPD

Bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat di kota dan desa kabupaten/kota yang paling parah menderita akibat krisis ekonomi melalui perbaikan dan pengadaan prasarana air bersih, irigasi, jalan, drainase, sanitasi dan fasilitas lain untuk menjaga kesehatan masyarakat, serta menciptakan peluang dan meningkatkan akses terhadap pusat perkotaan bagi peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan sifat program ini, yaitu bersifat perbantuan maka kabupaten/kota penerima bantuan P2MPD ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana penetapan daftar nama-nama kabupaten / kota dilakukan melalui perhitungan-perhitungan dengan menggunakan indikator makro ekonomi pada masa pra dan pasca krisis (data bersumber dari biro Pusat Statistik), di Propinsi Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan untuk berpartisipasi dalam Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) ada 12 Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Kabupaten. Banjarnegara
- b. Kabupaten. Cilacap
- c. Kabupaten Grobogan

- d. Kabupaten Magelang
- e. Kabupaten Banyumas
- f. Kabupaten Sragen
- g. **Kabupaten. Klaten**
- h. Kabupaten Boyolali
- i. Kabupaten Purbalingga
- j. Kabupaten Kebumen
- k. Kabupaten Wonogiri
- l. Kota Magelang.

(Sumber Pedoman Umum P2MPD)

Kabupaten Klaten merupakan salah satu yang mendapatkan Program P2MPD tahap I, dinilai telah melaksanakan program dengan baik. Hal ini dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan proses pelaksanaan program yang berjalan dengan kondusif. Untuk itu Kabupaten Klaten di Tahun 2003 diberi kesempatan mendapatkan bantuan lagi tahap II dengan nama P2MPD Mandiri. Kabupaten Klaten sebagai Penerima Program P2MPD karena memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, Penduduk miskin di Kabupaten Klaten sekitar 267.100 orang bisa dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1

Jumlah Penduduk Miskin (000 org) dan Presentasi Penduduk Miskin di
Propinsi Jawa Tengah Tahun 1999, 2002 dan 2003

No.	Kabupaten/Kota	1999		2002		2003	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Kab. Cilacap	469,30	29,72	360,70	22,12	343,10	20,90
2	Kab. Banyumas	624,10	44,05	336,80	22,88	322,80	21,50
3	Kab. Purbalingga	255,60	33,29	258,20	32,45	264,80	31,27
4	Kab. Banjarnegara	437,80	52,38	256,90	30,28	237,70	26,88
5	Kab. Kebumen	323,60	27,80	372,60	31,68	370,10	31,00
6	Kab. Purworejo	238,80	33,67	175,50	24,89	175,90	24,79
7	Kab. Wonosobo	249,70	35,39	253,50	33,75	250,20	32,96
8	Kab. Magelang	318,60	30,15	224,00	19,86	199,30	17,45
9	Kab. Temanggung	184,50	28,30	112,60	15,84	109,00	15,69
10	Kab. Boyolali	322,20	36,91	188,40	20,78	171,10	18,48
11	Kab. Klaten	262,80	23,55	286,50	24,54	267,10	23,84
12	Kab. Sukoharjo	98,90	13,36	134,80	16,86	122,50	15,17
13	Kab. Wonogiri	266,00	26,94	245,80	25,22	242,00	24,09
14	Kab. Karanganyar	113,00	14,83	134,00	17,04	141,70	17,45
15	Kab. Sragen	331,40	38,69	245,00	28,62	232,30	27,01
16	Kab. Grobogan	460,40	37,23	400,90	31,08	379,20	29,19
17	Kab. Blora	365,30	45,39	218,40	26,58	193,30	23,38
18	Kab. Rembang	88,20	15,70	189,00	33,38	184,80	32,06
19	Kab. Pati	346,60	21,36	263,80	22,51	245,40	20,66
20	Kab. Kudus	102,50	14,59	90,80	12,65	91,10	12,34
21	Kab. Jepara	69,60	7,57	105,50	10,56	104,60	10,11
22	Kab. Demak	208,50	22,16	243,80	24,14	250,40	24,43
23	Kab. Semarang	191,50	23,07	147,90	17,56	123,50	14,04
24	Kab. Kendal	149,10	17,31	204,10	23,75	201,40	22,84
25	Kab. Batang	205,50	32,68	155,00	22,99	143,20	20,68
26	Kab. Pekalongan	180,50	24,56	215,30	26,27	196,40	23,66
27	Kab. Pemasang	421,00	33,91	330,80	24,61	316,30	24,02
28	Kab. Tegal	388,10	29,27	313,40	22,23	306,20	21,42
29	Kab. Brebes	620,50	36,02	576,70	33,36	549,90	31,18
30	Kota Magelang	16,10	12,79	16,40	14,07	17,70	14,80
31	Kota Surakarta	91,30	17,23	69,40	14,23	72,80	15,00
32	Kota Salatiga	8,00	7,56	20,10	12,31	18,30	11,59
33	Kota Semarang	238,50	16,68	103,40	7,10	91,80	6,61
34	Kota Pekalongan	86,40	22,19	26,30	9,90	20,70	7,64
35	Kota Tegal	21,50	6,29	31,70	13,30	23,10	9,53
	Jawa Tengah	8755,40	28,46	7308,00	23,06	6979,80	21,78

Sumber Biro Pusat Statistik Jawa Tengah

3. Ruang Lingkup Pekerjaan/kegiatan P2MPD

Pekerjaan/Kegiatan yang didanai Proyek P2MPD terdiri dari dua tipe pekerjaan

- a. Tipe A; Pembangunan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana umum pada tingkat desa yang dikerjakan oleh masyarakat dengan alokasi dana Rp 15 juta sampai Rp 75 juta per desa. Dana maksimum untuk tiap kontrak dengan masyarakat adalah sebesar Rp 37,5 juta. Untuk setiap kecamatan dapat dialokasikan dana maksimal sebesar Rp 750 juta per kecamatan per tahun. Sub proyek dari pekerjaan Tipe A Sub proyek dari pekerjaan Tipe A merupakan pekerjaan prasarana skala kecil yang diseleksi, direncanakan dan dibangun di desa dan terdiri dari :

- Air Bersih
- Irigasi
- Jalan dan Jembatan lokal
- Sanitasi dan drainase
- Fasilitas Umum, seperti pasar, sekolah, MCK (bukan untuk kantor pemerintah dan bangunan keagamaan)
- Fasilitas transportasi air, seperti tambatan perahu (bukan dermaga kapal)

- b. Tipe B; pembangunan, perbaikan dan atau perluasan pekerjaan sarana/prasarana umum adalah jenis-jenis pekerjaan (sub proyek) yang sama dengan Tipe A, hanya dengan skala yang lebih besar di tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi dana maksimal Rp 3,75 milyar setiap sub

proyek. Nilai kontrak tunggal maksimal Rp 375 juta, dan sub proyek yang bernilai lebih dari Rp 1,5 milyar harus disertai analisa kelayakan ekonomi untuk memastikan bahwa telah dilakukan pendekatan biaya dan investasi tersebut dapat berkelanjutan. Dimungkinkan di Kota dilaksanakan pekerjaan Tipe A, bila dalam pekerjaan/pelaksanaannya dilakukan oleh dan lokasi kegiatan terletak di dalam batasa-batas wilayah administratif kota.

Setiap sub proyek pada kedua tipe diatas harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dan merupakan pilihan dengan biaya rendah. Dana bantuan yang disediakan mencakup dana untuk perencanaan, perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, publikasi dan administrasi pekerjaan. Semua pekerjaan harus sesuai standaer dan spesifikasi teknis yang berlaku (*Sumber ; Pedoman P2MPD*)

4. Penetapan Kelurahan/Desa Penerima Bantuan

Penetapan daftar nama Kecamatan/kelurahan/desa yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Proyek P2MPD ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Daftar tersebut merupakan masukan dalam penentuan prioritas daerah penerima bantuan dimana pengusulan nama-nama kecamatan/kelurahan/desa dilakukan “**bottom up**” melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK), Penetapan lokasi yang akan menerima bantuan P2MPD sekurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kecamatan/Kelurahan/Desa yang terkena dampak krisis cukup parah, yang ditunjukkan oleh tingginya penduduk miskin.
- b. Kecamatan/Kelurahan/Desa yang tidak/belum memiliki sarana/prasarana yang memadai, yang ditunjukkan oleh :

- 1) Tingkat ketersediaan sarana/prasarana dasar permukiman seperti, jalan, drainase, air bersih, MCK, dll
 - 2) Tingkat ketersediaan sarana/prasarana kegiatan produksi dan distribusi, seperti jalan, tambatan perahu, pasar, irigasi, dll.
- c. Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang tidak sedang mendapat bantuan dari proyek lain pada tahun yang sama, seperti Proyek Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
- d. Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam tahap pembangunan.

Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu Wilayah di Jawa Tengah dengan luas Wilayah 655,556 Ha dengan jumlah Penduduk 1.277.297 jiwa dan jumlah Kecamatan sebanyak 26, Desa 391 serta Kelurahan 10, dari 26 yang berpartisipasi dalam Program P2MPD sebanyak 21 Kecamatan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum P2MPD Kelurahan/Desa sasaran ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin, presentase penduduk miskin, kecamatan / desa yang belum menerima program sejenis PPK, P2KP dll. Selanjutnya untuk indikator dihitung peringkat Desa dan peringkat semua indikator dirata-ratakan untuk mendapatkan peringkat akhir. Berdasarkan masukan/usulan masyarakat dan eksekutif serta dengar pendapat dengan legislatif, Tim Koordinasi Kabupaten (TKK), mengkosultasikan usulan desa tersebut kepada Bupati dan kemudian ditetapkan menjadi SK Bupati Klaten No. 778

Tahun 2003 tertanggal Juli 2003 tentunya dengan berbagai pertimbangan serta mengacu pada Pedoman Umum Program P2MPD :

Usulan dan SK Bupati Desa Penerima Dana P2MPD Tahun 2003

No.	Kecamatan	Usulan Desa Penerima Dana P2MPD	SK Bupati Desa Penerima Dana P2MPD
1	2	3	4
1.	Cawas	Balak	-
		Gombang	-
		Plosowangi	Plosowangi
		Pogung	Pogung
		Tugu	Tugu
			Barepan
			Cawas
			Japanan
2.	Ceper	Cetan	Cetan
		Jambu Kidul	Jambu Kidul
		Jombor	Jombor
		Srebegan	Srebegan
			Dlimas
			Jambu Kulon
3	Delanggu	Bowan	Bowan
		Dukuh	-
		Krecek	-
		Tlobong	-
		Segaran	-
			Butuhan
4.	Gantiwarno	Gesikan	-
		Jabung	Jabung
		Kerten	Kerten
		Mlese	Mlese
		Muruh	Muruh
			Ngandong
5.	Jogonalan	Dompyongan	Dompyongan
		Joton	-
		Tambakan	Tambakan
		Wonoboyo	Wonoboyo

1	2	3	4
6.	Juwiring	Tanjung	-
		Bulurejo	-
		Juwiran	-
		Ketitang	-
		Kwarasan	Kwarasan
			Mrisen
			Serenan
7.	Kalikotes	Jimbung	Jimbung
		Ngemplak	Ngemplak
8.	Karanganom	Jungkare	Jungkare
		Jurangjero	Jurangjero
		Soropaten	Soropaten
		Troso	Troso
		Karanganom	-
			Gledeg
			Jambeyan
9.	Karangdowo	Babadan	Babadan
		Bulusan	Bulusan
		Demangan	Demangan
		Ringinputih	Ringinputih
		Soka	-
			Munggung
10.	Karangnongko	Blimbing	Blimbing
		Demakijo	-
		Jagalan	-
		Kanoman	Kanoman
			Logede
			Jetis
			Kadilajo
			Ngemplak
11.	Kebonarum	-	Basin
			Gondang
			Karangduren
			Pluneng

1	2	3	4
12.	Klaten Selatan	Ngalas	Ngalas
		Tegalyoso	-
13.	Klaten Tengah	Bareng	-
		Semangkak	-
14.	Klaten Utara	Jonggrangan	-
		Karanganom	-
15.	Ngawen	Duwet	Duwet
		Kwaren	-
		Manjung	-
		Tempursari	Tempursari
			Pepe
			Drono
16.	Pedan	Beji	Beji
		Kedungan	Kedungan
		Lemahhireng	Lemahhireng
		Ngaren	Ngaren
			Bendo
17.	Polanharjo	Janti	-
		Kranggan	-
		Kahuman	Kahuman
		Sidowayah	-
			Kapungan
18.	Prambanan	Cucukan	-
		Kemudo	-
		Kokosan	-
		Sanggrahan	-
19.	Tulung	Beji	
		Kemiri	
		Majenang	
		Tulung	
			Bono
			Gedongjetis
			Majegan
			Malangan
			Pomah

1	2	3	4
20.	Wedi	Kaligayam	Kaligayam
		Kadibolo	-
		Melikan	Melikan
		Paceng	-
			Pasung
21.	Wonosari	Bulan	Bulan
		Jelobo	Jelobo
		Ngreden	Ngreden
		Wadunggetas	Wadunggetas
		Sidowarno	-
			Gunting
			Lumbungkerep
			Teloyo

Sumber : *Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2003*

Penetapan desa yang mendapat alokasi dana dari Program P2MPD tersebut berada dalam klasifikasi desa miskin / tertinggal. Ditingkat Kabupaten, Struktur Organisasi P2MPD terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten (Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Pembangunan Setda, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kepala DPU dan Dinas terkait), Unit Pengelola Proyek (UPP) yang terdiri dari Sekretaris Proyek dan Pemimpin Proyek serta Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan fasilitator. Di Tingkat Kecamatan program ini dikelola oleh Koordinator pelaksana lapangan yang ditunjuk oleh Camat, sedangkan di tingkat Desa struktur organisasi P2MPD terdiri dari perangkat Desa, BPD, LKMD dan kelompok masyarakat penerima manfaat.

5. Indikator Pencapaian P2MPD di Kabupaten Klaten.

Beberapa Indikator yang telah terealisasi dalam Pencapaian P2MPD di Kabupaten Klaten.

a. Indikator pencapaian tujuan

Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintah, ditunjukkan dengan dilaksanakannya proses penentuan desa penerima dana P2MPD oleh Pemerintah Klaten dengan mengakomodir aspirasi masyarakat, eksekutif dan legislatif.

b. Indikator pencapaian maksud

Terdukungnya usaha desentralisasi Pemerintah

- 1) Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum, ditunjukkan dengan adanya pendekatan PPME pada penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten Tahun 2003.
- 2) Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam hal pembangunan, ditunjukkan dengan adanya komunikasi dua arah antara Kabupaten, Kecamatan, desa dan masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten Tahun 2003.

c. Indikator pencapaian hasil

Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

- 1) Ikut sertanya masyarakat desa dalam pembangunan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD.

- 2) Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi penerima dana P2MPD.
- 3) Meningkatnya kegiatan ekonomi dan pembangunan yang menggunakan prasarana jalan sebagai sarana transportasi.
- 4) Meningkatnya peranan Kabupaten Klaten sebagai wilayah lalu lintas antara yang menghubungkan wilayah-wilayah sekitar klaten.
- 5) Berkurangnya masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- 6) Meningkatnya Ketrampilan masyarakat.

Program ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, serta mempercepat pemulihan dampak krisis. Namun apakah program Program P2MPD tidak akan bernasib seperti program-program sebelumnya, PPK, P3DT, P2KP dan PDMDKE, yang belum bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat, ini terlihat dari belum terciptanya partisipasi masyarakat secara maksimal dan masih ditemukan indikasi negatif; yaitu penyalahgunaan dana, salah sasaran, serta tumpang tindih koordinasi, sehingga hasil yang diharapkan masih belum memuaskan dan bagaimana dengan program P2MPD sebagai komplemen dan pendukung program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang berbasis pada kekuatan masyarakat, apakah akan mencapai target seperti yang diharapkan ? Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat Judul “ *Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.* ”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemahaman Program P2MPD masih kurang dikarenakan dari 67 Desa Penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten TA 2003 adalah desa baru
- b. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang betul-betul mengetahui Program P2MPD.
- c. Waktu Pelaksanaan Program P2MPD sangat singkat.
- d. Masih adanya dominasi Pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi dana pada desa penerima Program P2MPD.
- e. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kadang kurang sesuai dengan kondisi realitas di Desa Penerima Program
- f. Masih banyaknya Penduduk Miskin.
- g. Masih banyaknya desa tertinggal yang memerlukan sarana dan prasarana.
- h. Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan dalam pembangunan
- i. Masih kurangnya partisipasi masyarakat
- j. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan
- k. Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur.

2. Perumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor pendukung apakah yang mempengaruhi evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ?
- b. Faktor-faktor penghambat apakah yang mempengaruhi evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ?
- c. Dampak dari Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Memperoleh gambaran evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten
2. Memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten
3. Memperoleh gambaran dampak dari Program Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Policy Maker

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya sebagai aktor pembuat kebijakan, agar dihasilkan program-program yang lebih baik dimasa mendatang, serta dapat menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek dan obyek dari program ini, bisa menyadari posisinya sebagai pelaku utama pembangunan.

3. Aparat Pengelola dan Pemelihara Program

Dapat memberikan strategi pengembangan program, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pengelola dan menghasilkan produk yang mampu merespon masyarakat.

BAB II

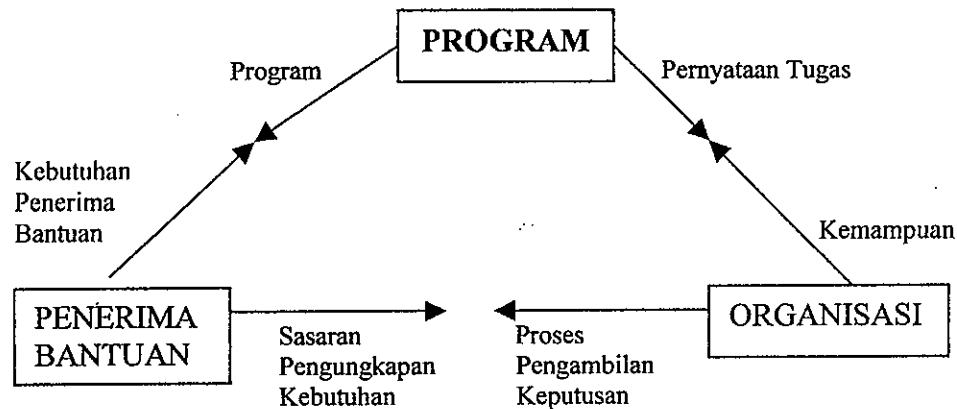
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori / Pengkajian Teoritis

Hasil suatu program pada awalnya telah berhasil dirumuskan sebagai konsensus para aktor, namun pada akhirnya sering kali dipersepsikan berbeda oleh para aktor. Suatu program dianggap berhasil oleh seorang aktor, sementara aktor lain menganggapnya kurang berhasil. Misalnya seorang peneliti dari badan pemerintah akan menganggap keberhasilan suatu program terletak pada sejauh mana hasil-hasil yang akan dicapai mengarah kepada tujuan yang telah direncanakan. Seorang peneliti lepas lain lagi, ia akan memandang keberhasilan dari data yang ia peroleh tentang hasil atau dampak yang telah diduga sebelumnya, yang tidak terduga, maupun yang dikehendaki atau tidak dikehendaki.

Menurut David C. Korten dalam bukunya Moeljarto Tjokrowinoto (1996, 136) terkait dengan program-program Pembangunan mengemukakan konsep tentang Three Way Fit atau Kesesuaian tiga arah. Teori ini menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptibilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program. Secara skematis persyaratan kelayakan program dapat dikemukakan dalam gambar. 1

Gambar .1
Persyaratan kelayakan program



Sumber dari : David C Korten (dalam Tjokrowinoto, 1996)

Menurut David C. Korten, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada hubungan erat atau sinergi (kesesuaian) antara :

- o Kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program
- o Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
- o Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Menurut David C. Korten, salah satu tantangan penting yang dihadapkan pada pembangunan yang memihak rakyat ialah mengubah arah birokrasi pembangunan yang penting-penting sehingga menjadi organisasi yang menghargai dan memperkuat sifat manusiawi baik di kalangan birokrasi itu sendiri maupun di kalangan warga negara yang hendak dilayaninya.

Menurut Gunawan (1999 : 138) Indikator keberhasilan Program untuk mengukur pelaksanaan Program adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok lain dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Tahapan yang penting dan sering terlupakan efektifitasnya dalam konteks kebijakan publik Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Sebesar besar kebijakan publik di Indonesia secara formal telah dilakukan evaluasi dengan baik. Namun Substansi kebijakan tersebut ternyata tidak tercapai secara efektif, bahkan sebagian lagi mengalami kegagalan.

Badjuri dan Teguh Yuwono (2002 : 132) Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut

diimplementasikan, ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisiennya, evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama yaitu :

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah tercapai tujuannya ?
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan ; serta
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Rossi dan Freeman, (1982) Secara umum tahap implementasi dan evaluasi kebijakan saling berhubungan erat. Kegiatan evaluasi pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai proses kebijakan publik yang menilai konseptualisasi dan perancangan implementasi, serta pelaksanaan program intervensi sosial.

Dye mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai studi tentang konsekuensi-konsekuensi kebijaksanaan umum atau merupakan penilaian secara menyeluruh efektivitas suatu program nasional dalam mencapai sasarannya atau penilaian efektivitas relatif dari dua atau lebih program yang mencerminkan tujuan bersama.

James Sorg menambahkan bahwa tujuan kebijakan seringkali tidak stabil, yang mungkin diakibatkan tidak jelasnya pernyataan legislative

sehingga membutuhkan perincian lebih lanjut atau bisa juga karena perubahan kondisi lingkungan.

Bryant and White, dalam bukunya Samodra, (1994 : 63) Evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah mendekati tujuan . Sedangkan evaluasi menurut Oberlin Silalahi dibedakan menjadi dua, yaitu *evaluasi program*, bila yang dipertimbangkan adalah suatu evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh sistem, dan *evaluasi masalah atau prosedur* yaitu bila yang dipertimbangkan hanya bagian dari sistem tersebut. Sementara itu Dye menambahkan evaluasi dampak kebijakan yang mencakup dampak pada situasi atau kelompok target, dampak pada situasi atau kelompok non-target, dampak pada waktu mendatang dan sekarang, serta biaya-biaya langsung dan tidak langsung. Hal-hal ini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Kasley dan Kumar (1987) dalam suatu evaluasi :

- a. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek ?
- b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut ?
- c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka ?

Adapun tujuan dari evaluasi menurut Samodra Wibowo yaitu untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung, serta menunjukan faktor-faktor yang dapat dimanipulasi supaya dapat diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara

implementasi lain. Menurut Donald F Heider, penilaian evaluasi juga dapat diarahkan untuk berbagai macam tujuan, tidak hanya sebagai alat untuk memperbaiki program-program, kadang evaluasi dilakukan untuk mendukung suatu program yang sedang berjalan, dan terkadang untuk meneliti agar program tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan pengurangan aktivitasnya.

Kemudian Gray (1993) menambahkan bahwa evaluasi suatu proyek bertujuan untuk menghindari proyek yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan datang, dengan dana yang telah tersedia supaya dapat memberikan keuntungan. Maksud memberikan keuntungan adalah bisa meningkatkan tingkat konsumsi, menaikkan kesempatan kerja, perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan, serta struktur kelembagaan. Menurut William Dunn (1999 : 608-609), evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya :

a. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

b. Interdependensi fakta-nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

c. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

d. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan), dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu

hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Karakteristik tersebut jika diterapkan pada Evaluasi Program P2MPD adalah :

- a. Evaluasi program ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat serta aparatur Pemerintah Daerah dan melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang mendukung keberhasilan program, yaitu sumber daya manusia, serta manajemen program yang baik.
- c. Keberhasilan yang dapat dinikmati sekarang oleh target group maupun non target group merupakan hasil dari proses perencanaan dan implementasi yang baik, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor kebijakan di masa lalu.
- d. Evaluasi merupakan tujuan sekaligus cara mengukur keberhasilan program P2MPD.

Di dalam mengevaluasi suatu program, seorang peneliti harus menentukan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa program itu berhasil atau tidak, mendekati tujuan atau tidak. Di dalam evaluasi kebijakan terdapat dua hal yang saling berhubungan erat, yaitu tujuan dan kriteria. Tujuan (*goals*) merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu

kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun angka-angka. Kriteria untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu dapat tercapai secara memuaskan (Suharyanto, 1996:134).

Kriteria yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah efektifitas program dan efisiensi program. Efektifitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output/sumberdaya yang digunakan oleh program dan outputnya atau layanan apa yang diterima oleh target group (Henry, 1988:233). Sementara menurut Dunn (1999:610) kriteria evaluasi terdiri dari berbagai tipe yaitu sebagai berikut :

a. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari diadakannya tindakan.

b. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.

c. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tindakan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Kesamaan

Erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan.

e. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan preferensi. Kriteria ini penting, karena analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria diatas, masih dianggap gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Kriteria yang dipilih karena dianggap penting untuk dijawab pada Evaluasi Program P2MPD ini adalah : *Efektivitas*, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?, *Efisiensi*, yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?, *Ketepatan*, yaitu apakah hasil yang diinginkan benar-benar bernilai?, dan *Responsivitas*, yaitu apakah hasil telah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu ?

Evaluasi terhadap kebijakan seringkali tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak seperti yang diharapkan, hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi. Menurut Islamy (1997:117), kendala penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, dan waktu, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. Kebanyakan program-program pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana.
- b. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara yang akan mengurangi tercapainya dampak yang diharapkan.
- c. Problema-problema publik seringkali timbul karena berbagai macam faktor dan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
- d. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi dampaknya.
- e. Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- f. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
- g. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.

- i. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Sementara itu Bryant and White (1987:200-201) merumuskan empat kendala dalam melakukan penelitian evaluasi :

- a. Evaluasi menjadi suatu ancaman karena mudah digunakan sebagai sarana mengkritik orang lain atau mengungguli kekuasaan lain.
- b. Kendala ekonomis, bahwa ekonomi yang baik itu mahal dari segi waktu dan uang, dan supaya tersedia banyak data tidak selalu sepadan dengan tingginya biaya tersebut.
- c. Kendala teknis dimana penanganan data sering menuntut adanya staf yang terlatih dan tersedianya kemampuan pengolahan data, termasuk waktu suatu fakta.
- d. Kendala politis, bahwa hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, tetapi juga secara politis memalukan jika diungkapkan. Seharusnya evaluasi dipandang sebagai bagian dari proyek, bukan mengidentifikasikan diri dengan kebijakan atau rancangan proyek tertentu, sehingga evaluasi menjadi bagian dari suatu proses belajar yang sedang berlangsung dan bukan sebagai suatu ancaman.

Kerhasilan program P2MPD di Kabupaten Klaten diperlukan :

- Adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat sebagai penerima program dan hasil-hasil dari pelaksanaan Program..
- Adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi dan pelaksana dalam mengelola organisasi.
- Adanya kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Samodra Wibawa (1994 : 96), menganggap ada dua pendekatan mengenai keberhasilan implementasi atau evaluasi.

- a. Pendekatan kepatuhan, seorang analis akan beranggapan bahwa implementasi atau evaluasi kebijakan berhasil apabila pelaksanaannya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Pendekatan ini dengan mudah memperoleh kritikan, yaitu dalam perumusan atau penetapan agenda masalah, dalam pelaksanaan kebijakan pun kekuatan-kekuatan non birokrasi sering mampu mempengaruhi apa yang akan dicapai. Secara intern, program sering tidak terdesain dengan baik, sehingga perilaku sempurna dari pelaksana program tidak akan berhasil menyelesaikan program.
- b. Pendekatan "What's happening" (apa yang terjadi). Pendekatan ini memotret pelaksanaan suatu kebijakan atau program dari segala hal, dengan asumsi bahwa implementasi atau evaluasi kebijakan dipengaruhi

oleh segala variabel dan faktor. Yang akan dipakai dalam penelitian adalah pendekatan *Whats happening* yang akan mengamati proses keberhasilan program P2MPD yang dipengaruhi oleh dua variabel yaitu peran administrator lokal dan pengawasan program. Pendekatan ini dipilih karena apa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan program jauh lebih penting daripada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan.

Adapun indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah

- a. Peningkatan ekonomi
- b. Peningkatan produktivitas sumber daya atau menghilangkan kegagalan pasar
 - 1) Menyediakan barang-barang umum
 - 2) Menyediakan informasi atau menurunkan biaya informasi untuk golongan masyarakat miskin.
 - 3) Menghilangkan atau meminimalisasi resiko
 - 4) Peningkatan pasar terbuka
- c. Distribusi keadilan
 - 1) Kecukupan
 - 2) Keadilan horizontal
 - 3) Keadilan vertical
- d. Keterlibatan warga negara
 - 1) Tingkat kepuasan

2) Hubungan timbal balik antara keterlibatan masyarakat dengan kebijakan publik

Sumber : Laura Irwin Langbein (1980 :15)

Hal ini senada dengan pendapat Gunawan (1999 : 138), menurutnya indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok lain dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Jadi indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan Program P2MPD adalah,

- a. Indikator peningkatan ekonomi, apakah program mampu mengatasi kemiskinan melalui akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dapat menggerakkan roda perekonomian,
- b. Indikator peningkatan produktivitas, apakah dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar dapat mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal,
- c. Distribusi keadilan, apakah semua lapisan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana umum dan *keempat*, keterlibatan masyarakat dan aparatur pemerintah untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan menggunakan berbagai tolok ukur tersebut maka segenap upaya pembangunan dilakukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dan di dalam dimensi kemiskinan mengharuskan setiap usaha pemberdayaan bagi rakyat miskin. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan mengambil langkah strategis yang langsung memperluas akses masyarakat pada sumber daya yang ada dan menciptakan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, karena partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat berpengaruh.

Keterlibatan masyarakat di dalam berbagai kegiatan disebut berpartisipasi, yaitu apabila tindakannya atau keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sesuai

dengan situasi mental dan emosinya sehingga mendorong mereka untuk menyumbangkan tenaganya bagi tercapainya tujuan kelompok dan ikut bertujuan terhadap keberhasilan kelompok (Keith Davis, 1975 : 228).

Menurut Mubyarto (dalam Ndraha 1990 : 102), partisipasi adalah suatu kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya Keith Davis (dalam Sentosa 1988 : 13) menjelaskan bahwa di dalam partisipasi setidaknya harus ada tiga unsur. *Pertama*, keterlibatan mental dan perasaan daripada keterlibatan daripada secara jasmaniah, kedua kesediaan memberi sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok dan yang *ketiga* adalah unsur tanggung jawab.

Selain hal tersebut, hal penting di dalam partisipasi adalah kesediaan untuk memberikan tanggapan yang positif dan aktif terhadap segala usaha yang ditujukan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sedangkan menurut Hofstede tahap-tahap dari partisipasi adalah

a. Tahap Inisiasi

Pada tahap ini seseorang atau kelompok mengusulkan untuk membuat suatu proyek. Usul ini dapat berasal dari perseorangan, kelompok masyarakat, maupun dari pimpinan formal dan informal, tetapi baru sampai pada tahap pembuatan usulan.

b. Tahap Legitimasi

Merupakan proses pengusulan dan pengesahan suatu proyek tertentu oleh masyarakat desa. Proses ini juga meliputi perundingan pendahuluan sebelum rapat desa merundingkan dan memutuskan apakah usul diterima atau tidak. Pada tahap ini dapat diketahui apakah suatu usulan dapat diterima atau tidak.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan pelaksanaan proyek, semua tindakan diarahkan untuk merealisasikan proyek, setelah rapat desa memutuskan untuk melaksanakan proyek. Tidak hanya sampai disini, masyarakat turut pula mengevaluasi program atau proyek setelah pelaksanaannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan, dimana potensi-potensi yang ada dalam diri masyarakat miskin dibangun dengan menggunakan pendekatan yang efektif, sehingga menimbulkan kepercayaan diri serta membangkitkan kekuatan baru untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

Menurut Gunawan (1999:134) kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah ke dalam tiga kelompok.

- a. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat.
- b. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
- c. kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap sasaran pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai budaya setempat.

Program P2MPD merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dasar

sehingga masyarakat memiliki akses dalam memanfaatkan sarana dan prasarana dasar tertentu. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat miskin ini diharapkan nantinya akan terwujud masyarakat yang mandiri. Kemandirian berarti mereka telah dapat dengan kekuatan sendiri mengorganisasi, manajemen sendiri, merumuskan masalah-masalah yang dihadapi, merumuskan strategi dan memilih alternatif-alternatif yang diperlukan dalam mengatasi masalah mereka (Bambang dalam Hagul, 1982:12). Dengan kemandirian masyarakat miskin tidak akan lagi bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga meskipun program telah dihentikan mereka dapat berswadaya dengan potensi yang telah ada dalam diri mereka.

Menurut Tjokrowinoto (Heru dalam Awan, 1995:34), untuk dapat menanggulangi kemiskinan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politik.
- b. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya pemutusan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin harus dilakukan.
- c. Menanamkan rasa kebersamaan (*egalitarian*) dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan takdir melainkan merupakan penjelmaan dari konstruksi sosial.

- d. Merealisasikan perumusan pembangunan dengan memusatkan pada masyarakat miskin secara penuh.
- e. Perlunya pembangunan sosial budaya bagi masyarakat miskin dan
- f. Perlunya redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat miskin sangat ditentukan oleh strategi yang tepat dan efektif. Menurut Gunawan (1999:130), strategi dasar pemberdayaan memiliki tiga arah yaitu pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, pemantapan otonomi daerah dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat dan modernisasi melalui penajaman serta pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. Secara nasional strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memadai bagi masyarakat.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan melalui program-program pemberdayaan sebagai berikut : Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikembangkan dan disempurnakan menjadi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). PPK merupakan pengembangan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program

Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program pengentasan kemiskinan melalui peminjaman modal kepada masyarakat miskin untuk pengembangan usaha mereka.

Seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian keterkaitan antar program pemberdayaan masyarakat mencakup keterkaitan misi, tujuan dan pendekatan lintas sektor. Proses perubahan itu hanya dapat lestari dan berkelanjutan jika digerakkan oleh masyarakat.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat Evaluasi Program

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dana dari Pemerintah
- b. Adanya dukungan manajemen umum, misalnya menyusun data, sistem evaluasi dan monitoring.
- c. Adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
- d. Adanya dukungan dari masyarakat
- e. Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

2. Faktor Penghambat

- a. Pemahaman Program masih kurang dikarenakan desa penerima dana adalah desa baru.

- b. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang betul-betul mengetahui Program .
- c. Waktu Pelaksanaan Program sangat singkat.
- d. Masih adanya dominasi Pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi dana pada desa penerima program.
- e. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kadang kurang sesuai dengan kondisi realitas di Desa Penerima Program
- f. Masih banyaknya penduduk miskin.
- g. Masih banyaknya desa tertinggal yang memerlukan sarana dan prasarana.
- h. Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan dalam pembangunan
- i. Masih kurangnya partisipasi masyarakat
- j. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan d
- k. Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur

C. Dampak Program

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Dearah (P2MPD) di Kabupaten Klaten ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, serta mempercepat pemulihan dampak krisis. Dampak Program P2MPD bisa dilihat dari beberapa Indikator keberhasilan :

1. Indikator pencapaian tujuan

Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintah, ditunjukkan dengan dilaksanakannya proses penentuan desa penerima dana P2MPD oleh Pemerintah Klaten dengan mengakomodir aspirasi masyarakat, eksekutif dan legislatif.

2. Indikator pencapaian maksud

Terdukungnya usaha desentralisasi Pemerintah

- a. Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum, ditunjukkan dengan adanya pendekatan PPME pada penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten Tahun 2003.
- b. Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam hal pembangunan, ditunjukkan dengan adanya komunikasi dua arah antara Kabupaten, Kecamatan, desa dan masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten Tahun 2003.

3. Indikator pencapaian hasil

Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

- a. Ikut sertanya masyarakat desa dalam pembangunan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana P2MPD.
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi penerima dana P2MPD.
- c. Meningkatnya kegiatan ekonomi dan pembangunan yang menggunakan prasarana jalan sebagai sarana transportasi.
- d. Meningkatnya peranan Kabupaten Klaten sebagai wilayah lalu lintas antara yang menghubungkan wilayah-wilayah sekitar klaten.
- e. Berkurangnya masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- f. Meningkatnya Ketrampilan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Prespektif Pendekatan Penelitian.

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Suatu penelitian sosial diharapkan mampu mengungkapkan fenomena atau peristiwa sosial tertentu dan pemahaman atas realitas sosial tersebut harus logis, dapat diterima oleh akal sehat dan harus sesuai dengan apa yang kita amati. Adapun pemilihan metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu obyek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti dan teknik yang akan digunakan untuk menngolah data bila sudah terkumpul.

Dalam suatu penelitian dikenal dengan adanya tipe penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Penjajakan (*eksploratif*)

Bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian penjelasan dan penelitian diskriptif.

2. Penelitian penjelasan (*eksplanatory*)

Menyoroti hubungan antara variable-variabel dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh karena itu dinamakan juga penelitian hipotesa.

3. Penelitian deskriptif.

Biasanya mempunyai dua tujuan pertama untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi, kedua untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena tertentu (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1995 : 8)

4. Penelitian Evaluasi.

Secara umum penelitian evaluasi terdiri dari evaluasi formal dan evaluasi summantif. Evaluasi formal adalah untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut, sedangkan evaluasi summantif dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai (Masri Singarimbun 1995:5)

Dari beberapa teori diatas, peneliti akan menggunakan penelitian evaluasi khususnya summantif, yang dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dapat tercapai, peneliti akan mengadakan evaluasi yang terkait dengan program yang meliputi :

- a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.
- b. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.
- c. Dampak dari Program Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.

Di dalam evaluasi program ini akan dipaparkan secara deskriptif tentang pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Klaten. Data-data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, tape recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya akan digunakan untuk memberi gambaran tentang penyajian laporan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah Program/Kegiatan P2MPD di Kabupaten Klaten. Disini akan dicari solusi dalam hal penanggulangan Kemiskinan yang terbaik tanpa mengesampingkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan., apabila terdapat hal-hal yang menghambat terciptanya efektifitas dalam program, dan solusi yang khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dalam penelitian ini dibatasi pada evaluasi Program P2MPD Tahun 2003, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.
- b. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten.

c. Dampak Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten meliputi aspek :

- 1) Aspek peningkatan prasarana pendukung kegiatan Sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Aspek Peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pembangunan.

C. Pemilihan Informan (sampel)

Pemilihan Informan (sampel) meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

1. Tingkat Kabupaten, Yaitu Struktur Organisasi P2MPD terdiri dari dari Tim Koordinasi Kabupaten (Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bagian Pembangunan Setda, Kepala DPU dan Dinas terkait), Unit Pengelola Proyek (UPP) yang terdiri dari Sekretaris Proyek dan Pemimpin Proyek serta Konsultan Manajemen Daerah (KMD) dan fasilitator.
2. Tingkat Kecamatan adalah Koordinator pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) lapangan yang ditunjuk oleh Camat.
3. Tingkat Desa organisasi P2MPD terdiri dari perangkat Desa, BPD, LKMD dan kelompok masyarakat penerima manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

D. Instrumen Penelitian.

Dalam Penelitian dengan metode kualitatif menurut Sugiono (2001:4) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong 2001:4; Sanapiah, 1990:19). Peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu sebelum turun lapangan, maka peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data : dokumen, laporan, tape recorder dan lain sebagainya.

E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pemanfaatan data sekunder.

1. Wawancara mendalam

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi secara detail dan mendalam atas aspek-aspek yang sedang diteliti kepada Kepala Bappeda, Sekretariat Program P2MPD, Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL), LKMD, BPD dan Tim Inti.

Untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat Evaluasi dan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah (P2MPD) di Kabupaten Klaten peneliti akan mengumpulkan data dari masukan dan pengeluaran dari Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang terdiri dari Bappeda

dan Pimpro, Bagian Pembangunan Kabupaten Klaten, Sedangkan Dampak dari pelaksanaan Program P2MPD peneliti akan mengumpulkan data dari Masyarakat dan Aparat Desa sebagai informan dengan melihat dampak dari hasil-hasil dan manfaat dari pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Klaten.

Masukan (Inputs)	Bappeda, Pimpro
Keluaran (Inputs)	Bappeda, Pimpro
Hasil (OutComes)	Masyarakat, Aparat Desa
Manfaat (Benefit)	Masyarakat Desa

2. Data Sekunder

Meskipun data statistik dan dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga masyarakat, pemerintah setempat dan pemerintah yang masih berkaitan dengan program.

F. Analisis Data

Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dsar, sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif. Pendiskripsian data dilakukan setelah proses peringkasan dilakukan. Data mentah yang ada kemudian diseleksi, disederhanakan dan diambil intinya, kemudian disajikan secara tertulis. Kemudian menganalisis data yang ada dan menarik verifikasi dari fenomena-fenomena tersebut dan membuat prediksi atas kemungkinan perkembangan selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Kondisi Sosial

a. Kependudukan

Penduduk di Kabupaten Klaten tidak hanya mencakup pada aspek kuantitas (pertumbuhan), kualitas dan persebarannya tetapi juga mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang menghambat pembangunan kependudukan itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2002 berjumlah 1.271.530 jiwa meliputi penduduk laki-laki sebanyak 619.155 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 652.375 jiwa yang tersebar di 26 Kecamatan. Jumlah penduduk pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebanyak 6.235 jiwa dibanding jumlah penduduk pada tahun 2001, dengan kepadatan penduduk sebesar 19,38 jiwa/km² dan laju pertumbuhan pertumbuhan 0,49 %.

Menurut tahapan keluarga sejahtera tahun 2002, di Kabupaten Klaten terdapat keluarga pra sejahtera sebanyak 73.297 (24 %) terdiri dari pra sejahtera alasan ekonomi sebanyak 54.683 dan prasejahtera alasan non ekonomi sebanyak 18.614. Sedangkan untuk keluarga sejahtera 1 sejumlah 63.846 (20.96 %) terdiri dari pra sejahtera alasan ekonomi sebanyak 33.178 dan pra sejahtera alasan non ekonomi sebanyak 30.668. Secara keseluruhan jumlah KK miskin yang terdiri dari pra sejahtera dan sejahtera 1 sebanyak 87.861.

TABEL. 2

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1

No.	Uraian	2001	2002
1.	Pra-Sejahtera	74.101	73.297
	a. Alasan Ekonomi	55.519	54.683
	b. Alasan Non Ekonomi	18.582	18.614
2.	Keluarga Sejahtera	63.543	63.846
	a. Alasan Ekonomi	32.971	33.178
	b. Alasan Non Ekonomi	30.572	30.668

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2002

b. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Klaten kualitas dan efektifitas sumberdaya manusia mempunyai korelasi positif dan erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada pengembangan kualitas sumberdaya agar terwujud tenaga kerja yang terampil, tangguh, memiliki kesadaran, tanggung jawab dan etos kerja tinggi. Lebih lanjut peningkatan pendidikan yang berorientasi penguasaan ketrampilan akan dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Klaten.

JML PENDUDUK		ANGKATAN KERJA				JML ANGKATAN KERJA		
		BEKERJA		TDK BEKERJA				
L	P	L	P	L	P	L	P	JML
617.304	469.315	305.364	301.455	54.822	53.174	360.186	354.619	714.805

Sumber BPS Kab. Klaten Tahun 2002

c. Pendidikan.

Tingkat Pendidikan penduduk sangat dipengaruhi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten, dimana salah satunya pendidikan membentuk watak dan kepribadian khususnya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dalam membangun ekonomi, sosial dan budaya. Di Kabupaten Klaten pendidikan merupakan tuntutan hidup efektif untuk meningkatkan pembangunan. Untuk mengetahui maju dan berkembangnya pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi, jumlah tenaga kerja menurut pendidikan, angka indeks jumlah murid menurut tahun pendidikan, ratio murid terhadap sekolah / guru dan banyaknya sekolah yang dibangun.

TABEL. 3

Jumlah Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan

ANGKATAN KERJA YANG MASIH MENGANGGUR								JML
SD		SLTP		SLTA		SARJANA		
L	P	L	P	L	P	L	P	
14.371	13.245	13.943	13.737	25.234	25.121	1.258	1.021	107.930

Sumber BPS Kab. Klaten Tahun 2002

d. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara murah dan merata. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi dan membaik. Untuk mencapai manusia yang sehat jasmani dan rohani dilaksanakan program-program peningkatan gizi, pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan dll.

TABEL 4
Sarana Kesehatan

No.	URAIAN	Tahun 2001	Tahun 2002
1	RSU / RS Swasta	4	4
2	RS Jiwa	1	1
3	Puskesmas	34	34
4	Pustu	81	81
5	Puskesmas Rawat Inap	10	10
6	Puskeling	31	31
7	Balai Pengobatan Swasta	19	19
8	Rumah Bersalin Negeri	7	7
9	Rumah Bersalin Swasta	28	28
10	Apotik	30	30
11	Toko Obat	16	16

Sumber : BPS Kab. Klaten Th. 2002

2. Kondisi Ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan sektor ekonomi primer ke sektor ekonomi sekunder dan tersier.

Indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan peningkatan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran penduduk Kabupaten Klaten.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pada data tahun 2002 cukup menggembirakan dimana pertumbuhan PDRB harga konstan meningkat sebesar 3.27 % dan harga berlaku meningkat 18.23 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

TABEL 5

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi atas dasar Harga Konstan Dalam Juta

No	Lapangan Usaha	2001		2002	
		Jumlah	Proporsi %	Jumlah	Proporsi %
1	Pertanian	230.692,35	18,48	224.150,57	17,40
2	Pengalihan	6.384,05	0,51	7.005,22	0,54
3	Industri Pengolahan	291.559,62	23,37	312.525,22	24,25
4	Listrik & Air Minum	11.672,16	0,94	12.259,62	0,95
5	Bangunan Konstruksi	105.575,37	8,50	108.430,65	8,42
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	336.931,01	27,00	349.729,25	27,14
7	Angkutan dan Komunikasi	48.090,13	3,85	52.614,90	4,08
8	Keuangan Persewaan, Jasa Perusahaan	64.550,37	5,17	66.814,42	5,19
9	Jasa-jasa	152.291,69	12,20	155.080,61	12,03

Sumber : BPS Kab. Klaten Th. 2002

Pada Tabel 5 diatas bahwa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2002 dari 9 lapangan usaha terdapat 4 lapangan usaha yang memberi konstribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Berturut-turut perdagangan, hotel dan restoran (27,14 %), Industri Pengolahan (24,25 %), sektor pertanian (17,40 %), dan sektor jasa (12,03 %).

Tabel. 6

Perkembangan PDRB Perkapita

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
	NILAI	% PERTUMBUHAN	NILAI	% PERTUMBUHAN
2001	2.656.401,06	12,98	988,745,06	3,38
2002	3.125.002,82	17,46	1.015.954,64	2,75

Sumber : BPS Kab. Klaten 2002

PDRB perkapita tahun 2002 dari hasil estimasi mengalami peningkatan yang signifikan dimana menurut harga berlaku sebesar Rp. 3.125.002,82 atau naik 17,46 % disbanding tahun 2001. Berdasarkan harga konstan tahun 2002 Rp. 1.015.954,64 atau naik sebesar 2,75 % dibanding tahun 2001.

3. Kondisi Sektor Industri dan Perdagangan.

Keberadaan sentra industri dan perdagangan di Kabupaten Klaten memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus menjawab permasalahan ketenagakerjaan. Perkembangan industri, cabang industri dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2002 secara umum mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2001.

Tabel 7

Perkembangan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja

No.	Kelompok Industri	Jumlah Perusahaan		Tenaga Kerja	
		2001	2002	2001	2002
1	Industri Kecil				
	a. IHPK	15.920	16.120	63.496	64.480
	b. ILMK	19.120	19.386	72.142	77.540
2.	Industri Menengah/Besar				
	a. IHPK	178	178	9.048	9.790
	b. ILMK	83	83	4.095	4.05
	Jumlah	35.301	35.767	148.781	155.905

Sumber : BPS Kab. Klaten 2002

Secara keseluruhan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.124 orang (4,78 %) terdapat pada industri besar, pada industri kecil terdapat kenaikan sekitar 6.382 orang (4,7 %) dan pada industri menengah dan sedang mengalami kenaikan sebanyak 742 orang (5,6 %).

Tabel. 8

Perkembangan Investasi dan Nilai Produksi

No.	Kelompok Industri	Jumlah Investasi (000)		Nilai Produksi (000)	
		2001	2002	2001	2002
1	Industri Kecil				
	a. IHPK	282.508.027	306.280.000	1.084.146.645	1.086.488.000
	b. ILMK	705.792.500	756.054.000	1.496.703.675	1.550.880.000
2.	Industri Menengah/Besar				
	a. IHPK	189.200.000	195.800.000	56.462.000	74.760.000
	b. ILMK	123.800.000	124.500.000	327.224.000	377.942.000
	Jumlah	1.301.300.500	1.382.634.000	2.964.526.300	3.090.070.000

Sumber : BPS Kab. Klaten 2002

Pada Tabel tersebut diatas menunjukkan perkembangan Investasi dan nilai produksi yang terjadi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar Rp. 81.333.500 (6,25 %), yaitu dari angka investasi tahun 2001 sejumlah Rp. 1.301.300.500 menjadi Rp. 1.382.634.000 pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 125.543.700 (4,23 %) dari nilai RP. 2.964.526.300 di tahun 2001. Peningkatan investasi tersebut lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan dunia perdagangan sektor non migas.

4. Kondisi Fisik Prasarana

a. Prasarana Jalan dan Jembatan.

Prasarana jalan dan jembatan mempunyai fungsi sangat penting mengingat Kabupaten Klaten terletak diantara kota Yogyakarta dan Surakarta. Jalan dan Jembatan sebagai penghubung transportasi dan distribusi, sehingga mobilitas penduduk semakin tinggi..

Untuk jalan Kabupaten sepanjang 768,49 km, 40 % diantaranya mengalami kerusakan yang terdiri dari rusak ringan sebanyak 20 % rusak sedang sebanyak 10 % dan rusak berat sebanyak 10 %. Dan untuk jalan desa yang ada diwilayah Klaten sepanjang 3.665,646 km yang terdiri dari jalan pros desa sebanyak 50 % berupa jalan aspal, betonisasi sudah relatif baik. Selebihnya merupakan jalan tanah dan jalan batu/kerikil masih memerlukan pembenahan. Yaitu jalan batu sepanjang 16,94 km dan jalan tanah sepanjang 128,64. Untuk mengetahui perkembangan Prasarana Jalan di Kabupaten Klaten (KM) dibisa dilihat pada tabel. 9

Tabel 9

Perkembangan Prasararana Jalan Kabupaten Klaten (KM)

NO	Uraian	2001	2002
1	2	3	4
1	Jumlah Ruas Jalan	336	336
2	Panjang Jalan	768,49	768,49
3	Jalan Menurut Kelasnya		
	a. Klas II	32,72	32,72
	b. Klas III A	34,09	34,09
	c. Klas IV	768,49	768,49
4	Jalan Menurut Statusnya		
	a. Jalan Negara	32,72	32,72
	b. Jalan Propinsi	34,09	34,09
	c. Jalan Kabupaten	768,49	768,49
5	Jalan Menurut Lapis Permukaan		
	a. Diaspal	622,91	622,91
	b. Makadam	16,94	16,94
	c. Tanah	128,64	126,64
6	Jalan Menurut Kondisi Fisiknya		
	a. Baik	228,64	236,89
	b. Sedang	387,47	346,27
	c. Rusak	152,38	185,33
7	Jalan Menurut fungsinya		
	a. Jalan Lokal primer	169,49	169,49
	b. Jalan lokal Sekunder	196,28	196,28
	c. Jalan Kolektor Sekunder	10,20	10,20
	d. Jalan Lokal Sekunder	392,52	92,52

Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2002

Pada Tabel.9 diatas diketahui bahwa secara umum kondisi jalan di Kabupaten Klaten cukup baik dimana jalan negara sepanjang 32,72 Km sudah 100 % ditingkatkan sedangkan jalan propinsi sepanjang 34,09 Km juga sudah cukup baik melalui pemeliharaan dan ditingkatkan. Dengan adanya Program P2MPD Pemerintah Daerah bersama masyarakat, diharapkan peran serta dari masyarakat akan lebih meningkat sehingga nantinya program-program yang bisa terpelihara dengan baik, berguna bagi kepentingan masyarakat sehingga transportasi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya terlaksana dengan baik serta lancar.

Tabel. 10

Perkembangan Jumlah Prasarana Jembatan di Kabupaten Klaten

No	Uraian	2001	2002
1	Jumlah Jembatan	217	217
2	Jembatan Menurut Kelasnya		
	a. Klas B	211	211
	b. Klas C	6	6
3	Jembatan Menurut Konstruksinya		
	a. Beton Bertulang	188	188
	b. Kerangka Beton	11	11
	c. Komposit	18	18
4	Jembatan Menurut Kondisi Fisiknya		
	a. Baik	203	203
	b. Sedang	12	12
	c. Rusak	2	2

Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2002

Dari tabel.10 diatas dilihat Perkembangan Jumlah Prasarana Jembatan di Kabupaten di Kabupaten Klaten Jumlah Jembatan dari Tahun 2001 – Tahun 2002 tidak ada perubahan / perkembangan masih sama, Diharapkan dengan program P2MPD Sarana Jembatan di Kabupaten Klaten bisa ditingkatkan baik Jumlah Jembatan, Kelasnya, Kontruksinya, maupun kondisi fisiknya. Sehingga hubungan antara daerah, antara desa dengan desa tidak terputus.

b. Sarana dan Prasarana Irigasi

Prasarana Irigasi merupakan sarana yang sangat menentukan dalam perekonomian di Kabupaten Klaten, dimana penduduk sebagian besar mengandalkan dari sektor pertanian yang memerlukan ketersediaan prasarana irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapitanya. Untuk itu prasarana irigasi selalu ditingkatkan keberadaannya.

Tabel. 11

Prasarana Pengairan dan Areal yang diairi di Kab. Klaten

No.	URAIAN	2001	2002
1	Bangunan Utama		
	a. Bendung (buah)	406	642
	b. Sumber (buah)	8	110
	c. Waduk (buah)	1	1
2	Saluran Irigasi		
	a. Saluran Induk (buah)	43.076	43.076
	b. Saluran Sekunder (buah)	483.050	483.050
3	Saluran Pembuangan / Afour		
	a. Saluran Induk (buah)	10.131	10.131
	b. Saluran Sekunder (buah)	17.204	17.204
4	Bangunan Pengatur		
	a. Bangunan Bagi (buah)	1.952	1.952
	b. Bangunan Sadap (buah)	49	49
	c. Bangunan Gorong-2 (buah)	1.938	1.938
	d. Bangunan Terjun (buah)	135	135
	e. Bangunan talang (buah)	127	127
	f. Bangunan Pelimpah (buah)	30	30
	g. Bangunan Sypon (buah)	29	29
	h. Bangunan Ukur (buah)	96	96
5	Areal Yang Daiari		
	a. Areal Teknis (ha)	18.095	18.095
	b. Areal ½ Teknis (ha)	10.566	10.566
	c. Areal Sederhana (ha)	1.058	1.058
	d. Areal tadah hujan	1.335	1.335

Sumber : BPS kab. Klaten 2002

Sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Klaten meliputi bangunan utama berjumlah 753 buah terdiri dari bendung, dan waduk, saluran irigasi sepanjang 526 m terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder. Saluran pembuangan sepanjang 27.335 m terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder. Bangunan pengatur berjumlah 4.401 buah, bangunan tersebut secara umum dalam kondisi 60 % baik, 25 % sedang dan 15 % dalam keadaan rusak.

- b. Memberdayakan masyarakat (*Community Empowerment*) khususnya masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan menyalurkan aspirasi serta mengidentifikasi masalah / kebutuhan sendiri.
- c. Peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat (*Capacity Building*) agar mampu bekerja secara produktif dan memperjuangkan kepentingannya.
- d. Memberi perlindungan sosial (*Social Protection*) kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang terkena dampak krisis, bencana alam maupun konflik social.

B. HASIL PENELITIAN

Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten ini menggunakan masukan (*Inputs*) Keluaran (*Outputs*), Hasil (*Outcomes*) dan Manfaat (*Benefits*), Analisa Evaluasi akan lebih difokuskan pada Indikator dampak dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten terutama Hasil dan Manfaat pembangunan prasarana sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sesuai dengan Wawancara dengan responden dan pengumpulan data dari TKK yang terdiri dari Bappeda, Sekretariat P2MPD, Dinas/Instansi selaku anggota TKK Kabupaten Klaten serta Koordinator Pelaksana Lapangan, Tingkat Kecamatan yang meliputi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Fasilitator juga dengan Kepala Desa, LKMD,

BPD, Tim Inti Desa selaku Penerima Program. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang ditimbulkan dari program peneliti dalam mengadakan wawancara dan pengumpulan data, membagi responden untuk mendapatkan data yang akurat, untuk mendapatkan informasi dari Pelaksanaan evaluasi Program P2MPD peneliti mencari masukan (*Inputs*) dan Keluaran (*Outputs*) mengadakan wawancara dan mencari data dengan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) terdiri Bappeda, Pimpinan Proyek, Bagian Pembangunan, serta dari Tim Tingkat Kecamatan terdiri Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator, UPP sedangkan untuk mencari Hasil (*Outcomes*) dan Manfaat (*Benefits*) walaupun dibantu dengan data dari TKK peneliti mengadakan wawancara dan pengumpulan data di tingkat desa terdiri Pemerintah Desa, BPD, LKMD, dan Tim Inti Desa sebagai penerima program. Dari Wawancara dan pengumpulan data peneliti memperoleh gambaran dari Pelaksanaan Evaluasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) serta Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program P2MPD serta mendapatkan informasi dampak dari Pelaksanaan Program P2MPD sebagai berikut :

1. Masukan (*Inputs*)

Masukan yang diukur sebagai kinerja program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah ; Pendekatan Program, Organisasi Pelaksana, dan Jumlah Dana ;

a. Pendekatan Program

Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) menggunakan pendekatan Pola Rencana Kerja Terintegrasi meliputi :

- 1) Pendekatan Perencanaan Partisipatif
- 2) Pendekatan Pelaksanaan Partisipatif
- 3) Pendekatan Monitoring Partisipatif
- 4) Pendekatan Evaluasi Partisipatif

Prinsip-prinsip partisipatif dalam Program P2MPD meliputi ;

- 1) Demokrasi
- 2) Keterbukaan
- 3) Kesukarelaan
- 4) Keswadayaan
- 5) Pemberdayaan
- 6) Kemandirian
- 7) Kebersamaan

b. Organisasi Pelaksana

Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dalam hal ini Bapenas telah mengeluarkan Pedoman pelaksanaan P2MPD, sebagai panduan, petunjuk pelaksanaan Tim Koordinasi P2MPD Kabupaten, Kecamatan, dan Desa :

- 1) Organisasi Pengelola Tingkat Desa

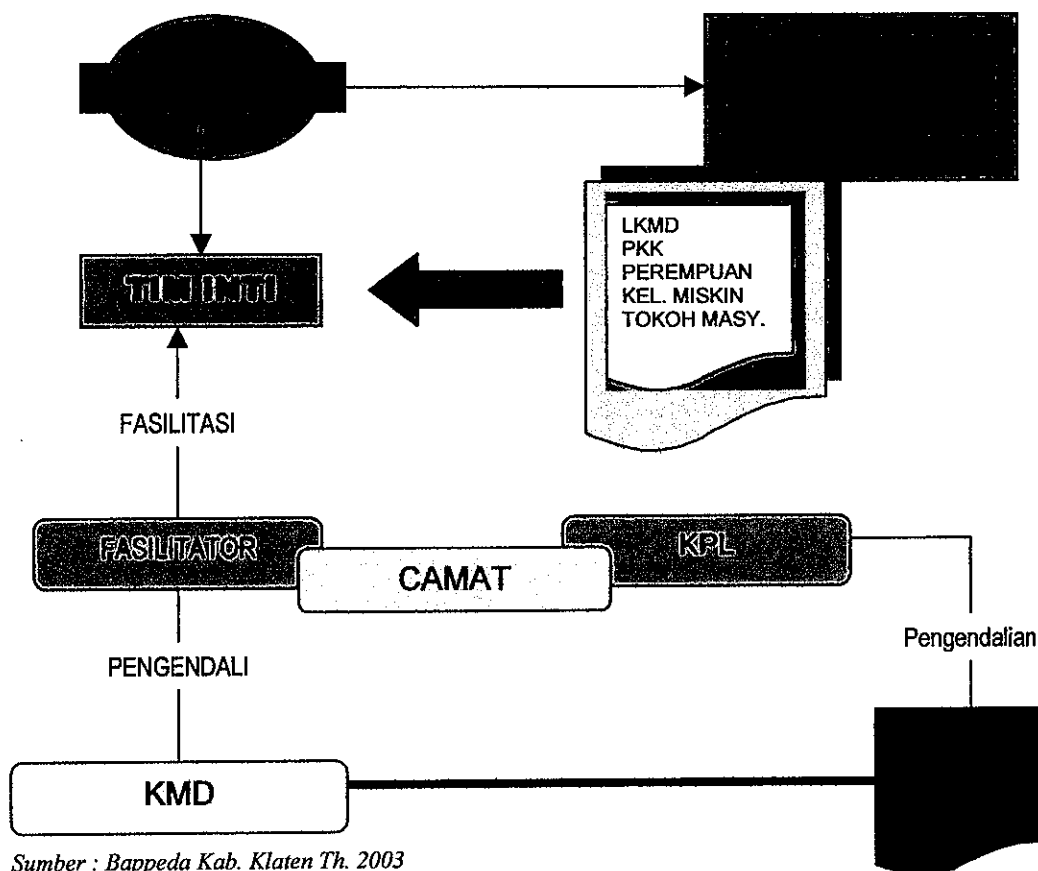
Program P2MPD di Tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Inti Desa yang dipilih dari masyarakat desa khususnya yang berasal / mewakili cluster miskin. Tim Inti Desa dibentuk meliputi :

- a) Tim Pelaksana, tim pelaksana bertugas ;
 - (1) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan mengelola pembangunan prasarana.
 - (2) Menyelenggarakan pembukuan penggunaan dana
 - (3) Menyiapkan dan menyampaikan laporan
 - b) Tim Monitoring dan Evaluasi, tim ini bertugas ;
 - (1) Memantau kegiatan lapangan
 - (2) Memeriksa laporan tim pelaksana
 - (3) Mengevaluasi hasil, manfaat dan dampak pembangunan secara partisipatif.
 - c) Tim Organisasi dan Pemeliharaan
 - (1) Bertanggung jawab atas kelestarian fungsi prasarana.
 - (2) Merumuskan cara-cara pemeliharaan baik yang berhubungan dengan waktu, sumber daya.
- Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa pada pelaksanaan Program P2MPD berperan :
- (1) Sebagai pendukung kegiatan warga.
 - (2) Meligitimasi kegiatan warga
 - (3) Menyebar luaskan informasi program P2MPD
 - (4) Membantu kegiatan fasilitator

(5) Mengkoordinasikan kerjasama fasilitator dan masyarakat.

Disamping itu tingkat desa juga didukung oleh LKMD dan Badan Perwakilan Desa (BPD). LKMD dan BPD akan bertindak selaku mobilisator terhadap Tim Inti Desa (TID)

Gambar 2 : Bagan Pelaksanaan P2MPD di Desa



Sumber : Bappeda Kab. Klaten Th. 2003

BPD mengontrol kinerja dari Pemerintah Desa, disamping itu tingkat desa juga didukung oleh LKMD, bertindak selaku mobilisator terhadap Tim Inti Desa (TID), di Tingkat Kecamatan memberikan Fasilitasi yang dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana Lapangan KPL), KMD disamping membantu secara teknis kepada UPP juga melaksanakan pengendalian bersama UPP.

2) Organisasi Pengelola Tingkat Kecamatan

a) Di Tingkat Kecamatan Camat bertugas dalam :

- (1) Memberikan dukungan kepada Kepala Desa/Lurah didalam program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program P2MPD di wilayahnya.
- (2) Memberikan dukungan kepada unit-unit manajemen ditingkat Kabupaten di dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan P2MPD di wilayah kerjanya
- (3) Melakukan sosialisasi tingkat kecamatan di wilayah kerjanya.

b) Di Tingkat Kecamatan program P2MPD dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL), dalam tugasnya KPL bertugas.

- (1) Mengumpulkan rencana pembangunan dari desa
- (2) Menyampaikan rencana desa ke Pimpro
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan fasilitator

c) Di Kecamatan terdapat fasilitator yang bertugas memfasilitasi desa yang meliputi :

- (1) Memfasilitasi lokakarya desa dalam menyusun rencana pembangunan prasarana tipe A denganmembentuk Tim Pelaksana, Tim Monitoring evaluasi dan Tim Operasional dan Pemeliharaan
- (2) Menyampaikan informasi P2MPD
- (3) Membantu kegiatan Tim Inti
- (4) Membantu administrasi Proyek

3) Organisasi Pengelola Tingkat Kabupaten.

Organisasi Pengelola Tingkat Kabupaten terdiri dari

a) Tim Koordinasi Kabupaten (TKK), terdiri dari

- (1) Sekretaris Daerah
- (2) Bappeda
- (3) Kantor PMD
- (4) Dinas PU
- (5) KPKN
- (6) Dinas Terkait

Tugas Umum TKK

- (1) Menyiapkan Pemilihan Desa/Kelurahan Proyek P2MPD
- (2) Melaksanakan penyiapan peran serta masyarakat, persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemeliharaan saran dan prasarana dibangun / yang diperbaiki melalui program P2MPD.
- (3) Meminta dan menilai laporan Unit Pengelola Proyek (UPP) mulai dari proses persiapan pelaksanaan dan pengendalian serta pemeliharaan prasarana dan saran terbangun / yang diperbaiki melalui program P2MPD.
- (4) Memberikan saran / umpan balik kepada Unit Pengelola Proyek (UPP) untuk ditindaklanjuti.
- (5) Berperan aktif dalam mengkoordinasikan Forum Dengar Pendapat

Tugas khusus masing-masing Instansi dalam TKK :

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi P2MPD bertugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan administrasi proyek akan membentuk Unit Pengelola Proyek (UPP) atau Project Manajemen Unit (PMU) untuk membantu TKK
 - (2) Bappeda Kabupaten sebagai anggota Tim Koordinasi P2MPD bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan P2MPD dengan program lainnya.
 - (3) Kantor PMD Kabupaten sebagai anggota Tim Koordinasi P2MPD bertugas dalam pembinaan penyiapan peran serta masyarakat dalam kelembagaan dalam proyek P2MPD.
 - (4) Dinas PU Kabupaten sebagai anggota Tim Koordinasi P2MPD bertugas dalam membina perencanaan dan pelaksanaan teknis serta pemeliharaan sarana dan prasarana P2MPD.
 - (5) KPKN sebagai anggota Tim Koordinasi P2MPD bertugas untuk pelaksanaan penyaluran dana dan system penyerapan dana.
- b) Unit Pengelola Proyek (UPP).
- Tugas umum UPP adalah membantu Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dalam melakukan Koordinasi dan manajemen Proyek.
- (1) Sekretaris Proyek khusus.

- (a) Membantu TKK dalam menyiapkan bahan pemrograman P2MPD
- (b) Menyiapkan data pendukung untuk pengambilan keputusan
- (c) Berperan aktif dalam melaksanakan Forum Dengar pendapat

(2) Pemimpin Proyek bertugas

- (a) Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pedoman Umum P2MPD dan Peraturan Lainnya yang relevan.
- (b) Program bantuan KMD melakukan verifikasi terhadap rencana teknis prasarana dan saran yang akan dibangun.
- (c) Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
- (d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana kepada Bupati.

c) Konsultan Manajemen Daerah (KMD)

- (1) Manajemen Umum
- (2) Rencana dan Program
- (3) Fasilitasi, Motivasi dan Kampanye Kepedulian Publik
- (4) Sistem Monitoring Pelaksanaan Proyek
- (5) Pendukung Pelaksanaan
- (6) Pengarusutamaan Gender

c. Rencana dan Program P2MPD

- 1) Meninjau kembali semua rencana dan prosedur pelaksanaan kegiatan sosial, fisik dan pengembangan ekonomi untuk memastikan bagaimana meningkatkannya termasuk partisipasi masyarakat, transparansi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- 2) Mendukung tim Fasilitator untuk meningkatkan rencana proses partisipasi dan aktifitas FPK tingkat Kabupaten.
- 3) Membantu Bappeda memprioritaskan anggaran tingkat Kabupaten.
- 4) Mengusulkan sumber dan alternatif yang tepat pada FPK dan atau membantu dalam penetapan skala prioritas untuk sub proyek bila Kabupaten mempunyai anggaran yang tidak cukup untuk mendanai semua usulan. Mendukung tim fasilitator untuk memastikan bahwa proses dilaksanakan secara benar, logis dan berjalan secara transparan dan hasil secara tepat dapat diberikan kepada masing-masing forum.

2. Keluaran (*Outputs*)

Untuk memproses masukan (*Inputs*) menjadi keluaran (*Outputs*) oleh Tim Koordinasi P2MPD Kabupaten, Konsultan Manajemen Daerah (KMD), Konsultan Pendamping (KP) dan Tim Pelaksana Desa (LMD) telah dilaksanakan melalui tahapan persiapan program, pelaksanaan, pencairan dana, monitoring evaluasi, Operasional Pemeliharaan, Lokakarya Evaluasi, pelaporan, Kontribusi Masyarakat tahapan dengan perincian sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan Program

1) Sosialisasi

a) Sosialisasi Kabupaten

Sebagai langkah awal pengenalan menyeluruh mengenai Program P2MPD, TKK dengan dibantu KMD dan UPP melaksanakan Sosialisasi Kabupaten. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Gedung RSPD Kabupaten Klaten dan dihadiri oleh TKK, KMD, UPP, Fasilitator, Komisi D DPRD Klaten, Camat, Koordiantor Pelaksana lapangan, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua LKMD dan Ketua BPD.

Sosialisasi dibuka oleh Bupati Klaten yang diwakili oleh Sekda dan dilanjutkan penyampaian TKK, UPP dan KMD, Paparan berisi tentang P2MPD secara menyeluruh dari tujuan, pendekatan pengelolaan, sasaran, pencairan dana dan pelaporan.

b) Sosialisasi Kecamatan

Setelah mengikuti Sosialisasi Kabupaten pada tanggal 30 Agustus 2003 di Gedung RSPD Klaten, Camat dengan Koordinator Pelaksana lapangan beserta Fasilitator Kecamatan melaksanakan fasilitasi di wilayahnya masing-masing dengan jadwal seperti pada tabel berikut :

Tabel . 12
Jadwal Sosialisasi Kecamatan
P2MPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003

No	Hari/Tanggal	Jam	Kecamatan	Tempat	Nama Fasilitator
1	2	3	4	5	6
1	Senin, 01 Sept 2003	08.00 WIB	Polanharjo	Aula Kecamatan	Eve farida N, ST
2	Rabu, 03 Sept 2003	08.00 WIB	Karangdowo	Aula Kecamatan	R. Basuki, ST
3	Kamis, 04 Sept 2003	08.00 WIB	Karanganom	Aula Kecamatan	Sularso, SE
4	Kamis, 04 Sept 2003	08.00 WIB	Ceper	Aula Kecamatan	1. Suci. W, SP 2. F. Naryanto, ST
5	Kamis, 04 Sept 2003	09.00 WIB	Pedan	Aula Kecamatan	1. T. Lupin D, ST 2. F. Naryanto, ST
6	Kamis, 04 Sept 2003	09.00 WIB	Wonosari	Aula Kecamatan	1. Sumina, ST, MT 2. A. Darmojo, ST
7	Kamis, 04 Sept 2003	09.00 WIB	Delanggu	Aula Kecamatan	Eve Farida N, ST
8	Kamis, 04 Sept 2003	10.00 WIB	Karangnongko	Aula Kecamatan	Ir. Heru Prayitno
9	Kamis, 04 Sept 2003	11.00 WIB	Gantiwarno	Aula Kecamatan	A. Tri Yuwono, SE
10	Jum'at, 05 Sept 2003	09.00 WIB	Ngawen	Aula Kecamatan	Dwi Aryani, ST
11	Jum'at, 05 Sept 2003	09.00 WIB	Tulung	Aula Kecamatan	Sucipto, SE
12	Sabtu, 06 Sept 2003	09.00 WIB	1. Jogonalan 2. Klaten Slt	Aula Kecamatan Jogonalan	Bayu R, K, ST
13	Sabtu, 06 Sept 2003	09.30 WIB	Wedi	Aula Kecamatan	Gamma Novi, ST
14	Senin, 06 Sept 2003	09.00 WIB	Cawas	Aula Kecamatan	1. Ruswanto, STP, MP 2. T. Lupin D, ST
15	Senin, 08 Sept 2003	08.00 WIB	Juwiring	Aula Kecamatan	1. Eve Farida N, ST 2. Agus Darmojo, ST

Sumber : Laporan Akhir P2MPD Th. 2003

Sosialisasi Kecamatan diikuti minimal Kepala Desa, Ketua LKMD dan Ketua BPD di tiap-tiap desa penerima Program P2MPD, Sosialisasi ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat pemahaman Kepala Desa, Ketua LKMD dan Ketua BPD terhadap Program P2MPD yang selanjutnya menjadi bekal mereka untuk melakukan sosialisasi di tingkat Desa. KMD beserta UPP memantau dan memonitoring pelaksanaan Sosialisasi Kecamatan ini, dengan tujuan melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang P2MPD, disamping itu KMD atau UPP menjadi nara sumber untuk pertanyaan yang muncul pada saat pelaksanaan sosialisasi.

c) Sosialisasi Desa

Setelah mengikuti Sosialisasi Kecamatan, Ketua LKMD dan Lurah bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi desa dengan didampingi fasilitator dan BPD. Sosialisasi desa dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari Kadus, RT, PKK, TOMA, TOMAS dan wakil masyarakat miskin dan perempuan.

KMD beserta UPP juga memantau dan memonitoring pelaksanaan Sosialisasi Desa di beberapa desa-desa sample, dengan tujuan melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang P2MPD, disamping itu KMD atau UPP juga menjadi nara sumber untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan sosialisasi.

2) Orientasi

Setelah melaksanakan sosialisasi desa, fasilitator dengan didampingi perangkat desa melakukan orientasi desa. Tahap ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data/informasi awal tentang dusun/RW dan mengidentifikasi dusun miskin. Dengan tambahan data monografi/profil desa fasilitator dapat mendeskripsikan kondisi desa, kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta memetakan kantong-kantong kemiskinan. Lebih lanjut dapat diidentifikasi pula calon-calon masyarakat wakil cluster miskin.

3) Lokakarya

Lokakarya dimulai dengan penetapan anggota Tim Inti Desa dengan syarat :

- o Maksimal berjumlah 15 orang
- o Sepertiganya wakil perempuan
- o Sepertiganya wakil cluster miskin.

Setelah ditetapkan maka dipilih Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tim Pelaksana, Tim Money, Tim Operasional Pemeliharaan.

Lokakarya dilaksanakan minimal tiga kali dengan didampingi fasilitator. Lokarya dilaksanakan untuk mengidentifikasi sarana/prasarana yang akan dibangun / diperbaiki, menyusun proposal rencana pembangunan dan rancangan teknisnya, pendatanganan proposal tersebut kepada TID, Kepada Desa, Ketua LKMD, Ketua BPD dan fasilitator, serta membentuk Pelaksana, Tim Monitoring Evaluasi dan Tim Operasional Pemeliharaan.

4) Verifikasi.

Mekanika Verifikasi Proposal P2MPD Kabupaten Klaten T.A 2003

a) Waktu Penyerahan Proposal 10 – 22 September 2002

b) Jumlah Proposal : 6 Eksemplar

- o 1 (satu) eksemplar asli ditujukan kepada Bupati melalui KMD/UPP/Pimpro
- o Tembusan diberikan kepada :
 - KMD : 1 eksemplar
 - Kecamatan : 1 eksemplar
 - Fasilitator : 1 eksemplar
 - Kepala Desa : 1 eksemplar
 - Tim Inti Desa : 1 eksemplar

c) Mekanisme Pengumpulan :

- (1) Pengajuan Proposal asli kepada Bupati diserahkan Bupati melalui Fasilitator kepada KMD/UPP/Pimpro di Sekretariat.
- (2) 2 Eksemplar diserahkan oleh Tim Inti Desa kepada Fasilitator untuk KMD dan arsip fasilitator
- (3) 1 eksemplar menjadi arsip kecamatan diserahkan melalui KPL.
- (4) 1 eksemplar menjadi arsip desa
- (5) 1 eksemplar menjadi arsip TID

d) Organisasi Verifikasi proposal :

Ketua UPP	: Eko Medi Sukasto, SH, MM
Pimpro / Koordinator Sekretariat	: Pramana Agus W, ST
Ketua Urusan Verifikasi dan PTL	: Ir. Bambang Agus Susilo
Anggota Urusan Verifikasi dan PTL	: Fx. Suropto
Anggota Urusan Verifikasi dan PTL	: Sunardi, BE
Anggota Urusan Verifikasi dan PTL	: Marmo
Anggota Urusan Verifikasi dan PTL	: Sumarno, Amd
Anggota Urusan Verifikasi dan PTL	: Himawan Pamungkas
KMD	: Ir. Arief.S. Widodo
KMD	: Ir. Sigit Hertanto
KMD	: Sigit Budi Rahardja, ST

e) Waktu Verifikasi : 23 – 30 September

f) Tempat Verifikasi : Ruang Rapat Bapeda Kabupaten Klaten

g) Aspek Verifikasi :

- Aspek Administrasi : telah mengikuti acuan di Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis P2MPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003.
- Aspek Teknis : dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat desa
- Aspek Biaya : sesuai dengan standar biaya perkiraan teknis (berdasarkan SK Bupati Tahun 2003 mengenai Harga Satuan Dasar)
- Aspek Manfaat : dapat langsung dimanfaatkan di akhir proyek.

5) Rekomendasi

Dari Rekomendasi Bupati dapat dilaporkan bahwa ada 95 paket pekerjaan di 80 Desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Paket pekerjaan untuk ruang lingkup pemukiman masih mendominasi dengan jumlah paket 90 % terdiri dari betonisasi 35 %, jalan aspal 16 %, jalan makadam 7 %, talud jalan 23 % dan jembatan 4 %. Sementara ruang lingkup Produksi dan Distribusi hanya 10 % terdiri dari Irigasi 9 % dan Pasar Desa 1 %.

6) Penandatanganan SP3

Di akhir bulan September 2003, KMD bersama UPP dan Pimpro menyiapkan pelaksanaan penandatanganan Surat Perintah Pemberian Pekerjaan (SP3) yang direncanakan akan dilaksanakan di Gedung RSPD Kabupaten Klaten dan berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2003.

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan pekerjaan meliputi :

1) Kecamatan Cawas.

- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 6 paket
- Pekerjaan Makadam terdiri dari 2 paket

2) Kecamatan Ceper

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri 5 paket
- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Talud jalan terdiri dari 2 paket

3) Kecamatan Delanggu.

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Jembatan terdiri dari 1 paket

4) Kecamatan Gantiwarno

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri 3 paket
- Pekerjaan jalan aspal terdiri 1 paket
- Pekerjaan Talud jalan terdiri dari 1 paket

5) Kecamatan Jogonalan

- Pekerjaan Aspal Jalan terdiri 2 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 1 paket

6) Kecamatan Juwiring.

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket

- Pekerjaan etonisasi jalan terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan jalan aspal terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Makadam jalan terdiri dari 2 paket

7) Kecamatan Kalikotes.

- Pekerjaan Betonisasi Jalan terdiri dari 1 paket.
- Pekerjaan Talud jalan terdiri dari 1 paket

8) Kecamatan Karanganom.

- PekerjaanBetonisasi Jalan terdiri dari 1 paket.
- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 3 paket

9) Kecamatan Karangdowo

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket.
- Pekerjaan Betonisasi Jalan terdiri dari 5 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 1 paket.

10) Kecamatan Karangnongko

- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 3 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 2 paket

11) Kecamatan Kebonarum

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket.
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 3 paket
- Pekerjaan Jembatan terdiri dari 1 paket

12) Kecamatan Klaten Selatan

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 1 paket.

13) Kecamatan Ngawen.

- Pekerjaan Betonisasi Jalan terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Talud jalan terdiri dari 3 paket

14) Kecamatan Pedan

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Betonisasi Jalan terdiri dari 5 paket
- Pekerjaan talud jalan terdiri dari 1 paket

15) Kecamatan Polanharjo

- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Makadam jalan terdiri dari 1 paket.

16) Kecamatan Tulung

- Pekerjaan Irigasi terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan pasar terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Makadam jalan terdiri dari 1 paket.

17) Kecamatan Wedi

- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan jalan aspal terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 1 paket

18) Kecamatan Wonosari.

- Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Jalan Aspal terdiri dari 2 paket
- Pekerjaan Makadam Jalan terdiri dari 1 paket
- Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 4 paket
- Pekerjaan Jembatan terdiri dari 2 paket

Dari data 18 Kecamatan tersebut, untuk jenis dan jumlah paket pekerjaan untuk tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan pembangunan dalam ruang lingkup sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan produksi dan distribusi 10 paket yang terinci dari :
 - Pekerjaan Irigasi terdiri dari 9 paket.
 - Pekerjaan Pasar terdiri dari 1 paket
- 2) Pekerjaan Pembangunan dalam ruang lingkup sarana dan prasarana dasar pemukiman yang langsung berhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi desa sebanyak 85 paket terinci dari :
 - Pekerjaan Betonisasi jalan terdiri dari 35 paket
 - Pekerjaan Jalan aspal terdiri dari 16 paket
 - Pekerjaan Makadam jalan terdiri dari 7 paket
 - Pekerjaan Talud Jalan terdiri dari 23 paket
 - Pekerjaan Jembatan terdiri dari 4 paket

Total dalam Kabupaten berjumlah 62 paket pekerjaan dengan volume pekerjaan akhir lebih besar dari volume rekomendasi/SP3 sementara paket

pekerjaan mempunyai volume pekerjaan akhir sama dengan volume rekomendasi/SP3.

c. Pencairan dana

Sampai dengan hari terakhir semua berkas pencairan dana desa telah masuk ke Kasda dan ke KPKN. Semua dana tahap I, Tahap, II dan tahap II APBD untuk semua desa telah dicairkan. Demikian juga untuk dana tahap I dan tahap II Loan juga sudah dapat dicairkan. Sementara untuk dana tahap II Loan, semua berkas telah masuk KPKN dan tinggal menunggu proses pencairan.

Salah satu penyebab belum dapat dicairkannya dana tahap II loan adalah karena diminggu terakhir bulan Nopember (22 sampai dengan 30 November) merupakan hari libur lebaran (hari Raya Idul Fitri 1424 H) sehingga semua pegawai baik Kas Daerah, KPKN, maupun Bank BPD Jateng Cabang Klaten juga memasuki hari libur. Sehingga proses pada awal bulan Desember. Beberapa penyebab yang lain diantaranya adalah banyaknya berkas pencairan dana untuk proyek-proyek lain diluar APBD.

Perincian Pencairan dana desa sebagai berikut :

Bulan Oktober : Tahap 1 APBD untuk 95 paket

Bulan November : Tahap II APBD untuk 88 paket

Tahap III APBD untuk 24 paket

Tahap I BLN untuk 30 paket

Bulan Desember : Tahap II APBD untuk 7 paket

Tahap III APBD untuk 71 paket

Tahap II BLN untuk 30 paket

Tahap III BLN untuk 30 paket

Penyerapan dana adalah sebagai berikut :

Bulan Oktober : Dana APBD sebesar Rp. 545.336.297,-

Bulan November : Dana APBD sebesar Rp. 949.722.000,-

Dana BLN sebesar RP. 149.999.983,20,-

Bulan Desember : Dana APBD sebesar Rp. 322.729.359,-

Dana BLN sebesar Rp. 349.999.960.80,-

Pajak APBD terbayarkan sebesar Rp. 181.778.766,-

d. Monitoring Evaluasi.

Fokus monitoring dan evaluasi untuk P2MPD Type A terintegrasi di dalam Proses pendekatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif bagi pembangunan prasarana, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial-ekonomi pada tingkat desa/kelurahan. Di akhir proyek, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan dampak keseluruhan proyek dengan menggunakan kerangka kerja logis, termasuk indikator-indikator pencapaian hasil, alat atau verifikasi dan asumsi-asumsi serta resiko-resiko yang berkembang dalam Matriks Kerangka Logis. Hasil dari monitoring dan evaluasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik Tingkat Desa maupun Kabupaten :

1) Monev Tingkat Kabupaten.

UPP selaku pengelola pelaksana Proyek bersama KMD dan Pimpro melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik di desa penerima dana.

Monitoring dilakukan terhadap data-data administrasi Tim Inti Desa disetiap tahapan kegiatan seperti sosialisasi desa, lokakarya dan pelaksanaan fisik di lapangan beserta kelengkapan-kelengkapan proyek seperti papan nama proyek, papan informasi, foto-foto proyek dan posko Tim Inti Desa serta pemasangan spanduk P2MPD. Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap 35 desa sample dari 80 desa penerima dana yang tersebar di 18 kecamatan.

Metode Monitoring adalah dengan wawancara langsung terhadap Kepala Desa, BPD, LKMD/nama lain, Tim Inti Desa mengenai tahap Sosialisasi Desa, Lokarya Desa TID dan pelaksanaan fisik pekerjaan juga dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

2) Monev KMD

KMD secara mandiri juga melakukan monitoring dan evaluasi di desa lain atau desa yang sama namun dengan bobot pekerjaan atau permasalahan yang cukup berat dan memerlukan untuk segera diambil langkah penyelesaian.

Metode pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KMD untuk TID adalah dengan melakukan kunjungan lapangan kemudian melakukan wawancara dengan anggota TID maupun masyarakat sekitarnya. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KMD meliputi, Partisipasi masyarakat, Kemampuan Teknis, Kemampuan Administrasi, Kemampuan Pengelolaan, Transparansi.

3) Monev TID.

Tim Monitoring dan evaluasi dari TID (Tim Inti Desa) melalui fasilitasi KMD dan fasilitator juga melaksanakan monitoring secara mandiri terhadap pelaksanaan proyek.

Semua hasil monitoring dan evaluasi baik dari Tim Kabupaten (UPP, Pimpro, KMD, dan KPM), monitoring dan evaluasi mandiri dari KMD, monitoring dan evaluasi mandiri dari Tim Inti Desa disusun menjadi laporan hasil monitoring dan evaluasi berada format Sistem Informasi Manajemen (SIM) bulanan kabupaten dan desa. KMD secara langsung atau melalui fasilitator juga melakukan fasilitasi pembuatan laporan Tim Inti Desa.

4) Monev Bapenas dan ADB

Pada bulan November 2003, Kabupaten Klaten kedatangan Tim Monev dari ADB dan Bapenas. KMD mendampingi Pimpro untuk melaporkan kegiatan proyek yang telah berlangsung serta operasional dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun. yang dimonitoring kelengkapan administrasi desa, hasil pembangunan fisik dan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan bagi desa penerima dana P2MPD.

e. Operasional Pemeliharaan

Operasional dan pemeliharaan menjadi tahapan yang mutlak dilaksanakan : bagi keberlanjutan dan kelestarian manfaat saran-sarana fisik yang telah dibangun. Operasional dan pemeliharaan saran-saran fisik desa yang dibiayai oleh P2MPD dan dikerjakan Tim Inti Desa (TID) mulai dilaksanakan

terhitung sejak penyerapan oleh TID kepada pemerintah desa. Metode dan mekanisme operasional dan pemeliharaan telah diberikan oleh Konsultan Manajemen Daerah melalui fasilitator kepada Tim Operasional dan pemeliharaan maupun kepada desa dan masyarakat desa pada umumnya. Tahap operasi dan pemeliharaan adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dibawah koordinasi Tim Inti desa khususnya Tim Operasi dan Pemeliharaan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong keberlanjutan pemeliharaan dan meningkatkan fungsi prasaran yang dibangun. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pembangunan prasarana fisik selesai dilaksanakan sampai dengan masa proyek P2MPD selesai. Bahkan kegiatan operasional dan pemeliharaan ini diharapkan terus berlangsung meskipun proyek sudah berakhir, apabila memungkinkan dapat dilakukan pengembangan fungsi prasarana tersebut dapat ditingkatkan.

f. Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Program P2MPD.

Kegiatan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan untuk memantau pelaksanaan suatu pekerjaan mulai dari proses hingga perkembangan pelaksanaannya. Fokus dari kegiatan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program yang sudah berlangsung. Lebih spesifik lagi, fokus evaluasi lebih diarahkan pada komponen proses pelaksanaan program baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses kegiatan dilapangan. Disamping itu kegiatan evaluasi

merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembangunan dengan criteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan evaluasi akan didapatkan informasi tentang tingkat kinerja dan nilai hasil. Metode Lokakarya evaluasi Pelaksanaan Program P2MPD Kabupaten Klaten yang digunakan adalah :

- o Ekspose pelaksanaan tugas unit kerja pengelola proyek yang meliputi TKK, UPP/Pimpro, KMD dan TID.
- o Diskusi dan pembahasan yang diketahui oleh semua peserta.

Evaluasi dilaksanakan dengan metode partisipatif, dimana para peserta diarahkan dan diharapkan berperan aktif tanpa memandang posisinya, Unsur KMD bertindak sebagai moderator.

g. Pelaporan.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Tim Inti Desa membuat laporan, baik laporan tahap persiapan (Sosialisasi Desa, Orientasi, Lokakarya TID, proposal) maupun tahap pelaksanaan (laporan tim inti pelaksana, tim monitoring dan evaluasi, tim operasional dan pemeliharaan, laporan keuangan). Laporan tim inti desa tersebut disusun menjadi laporan akhir Tim Inti Desa.

h. Kontribusi Masyarakat.

Salah satu indikator proses pemberdayaan masyarakat bisa dinilai berjalan atau berhasil adalah ketika masyarakat mau dan mampu mengidentifikasi

kepentingan atau harapan, memilih dan memutuskannya, merencanakan, melaksanakan dan mengoperasionalkan serta melestarikan hasilnya.

Semua proses dilaksanakan Tim Inti Desa dalam program P2MPD Kabupaten Klaten TA 2003 dan bahkan wujud dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat, secara mandiri dengan swadaya masyarakat, TID mengembangkan pelaksanaan pembangunan desa. Dari Program P2MPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003 secara umum kontribusi masyarakat sebesar Rp. 813.481.92,00 yang digunakan untuk mengembangkan pembangunan prasarana dasar desa yang belum ada atau belum memadai .

Tabel . 13

Kontribusi Masyarakat dengan Dana P2MPD di Kabupaten Klaten T.A 2003

No	Kecamatan	Biaya Netto P2MPD (Rp)	Kontribusi Masyarakat (Rp)	Lama Pekerjaan (hari)
1	2	3	4	5
1	Cawas	193.040.000	34.647.000	45
2	Ceper	241.697.600	46.990.000	45
3	Delanggu	49.020.000	74.477.000	45
4	Gantiwarno	148.040.000	19.659.350.00	45
5	Jogonalan	73.530.000	12.979.250.00	45
6	Juwiring	118.530.000	10.169.000.00	45
7	Kalikotes	49.020.000	30.640.350.00	45
8	Karanganom	147.060.000	100.407.500.00	45
9	Karangdowo	168.530.000	23.137.500.00	45
10	Karangnongko	167.550.000	65.976.200.00	45
11	Kebonarum	118.530.000	13.915.500.00	45
12	Klaten Selatan	49.020.000	14.530.030.00	45
13	Ngawen	122.550.000	135.935.200.00	45
14	Pedan	163.530.000	31.968.900.00	45
15	Polanharjo	49.020.000	10.334.330.00	45
16	Tulung	122.550.000	89.525.370.00	45
17	Wedi	73.530.000	23.532.900.00	45
18	Wonosari	263.040.000	74.134.250.00	45
Jumlah		2.317.787.600	813.481.092.00	

Sumber Laporan Akhir P2MPD dari KMD Th. 2003

Dari Tabel Nomor 13 dapat dilihat bahwa besar kontribusi masyarakat di Kabupaten Klaten yang dijumlah per Kecamatan dalam mendukung program P2MPD sebesar Rp. 813.481.092.- yang dikelola dari swadaya masyarakat sedangkan Jumlah dana bantuan Bantuan Program Pendukung P2MPD di Kabupaten Klaten dari Jumlah per Kecamatan sebesar Rp. 2.317.787.600,- .

3. Hasil (*Outcomes*)

Program P2MPD di Kabupaten Klaten T.A 2003 menitik beratkan pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan produksi dan distribusi baru diikuti pelaksanaan pembangunan dalam ruang lingkup sarana dan prasarana dasar pemukiman yang langsung berhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi desa. Dasar dari kebijakan diatas adalah mengingat sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten adalah petani, yang bertempat tinggal di desa-desa yang jauh dari perkotaan dan minim saran dan prasaran dasar kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu juga mengingat julukan Kabupaten Klaten sebagai lumbung padi di Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya Program P2MPD di Kabupaten Klaten dari 95 paket pembangunan yang dilaksanakan oleh 80 TID, hanya sekitar 10 paket (11%) yang langsung berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan produksi dan distribusi (Irigasi 9 paket (10 %) dan pasar desa 1 paket (1%). Sementara itu sekitar 85 paket (89 %) lagi merupakan pembangunan saran dan prasarana dasar permukiman yang langsung berhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi desa. Namun begitu ke 85 paket pekerjaan ini juga mendukung

percepatan perkembangan perekonomian setempat yang pada akhirnya membantu taraf penghidupan petani masyarakat miskin dan pengangguran.

a. Irigasi

Sebagai salah satu lumbung padi maka perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana irigasi sangat dibutuhkan. Terutama pada musim-musim kemarau banyak dibutuhkan air untuk mengairi daerah persawahan. Saat ini datangnya musim hujan sangat sulit diprediksikan, sehingga petani kesusahan mendapatkan air pada saat dibutuhkan untuk mengairi sawah. Kebutuhan air biasanya didapatkan dari sumber air yang ada namun, tentu saja debit airnya tak mencukupi, Sehingga untuk memperkecil factor penyerapan air pada saluran tanah yang ada maka dibutuhkan perbaikan / pembangunan saluran irigasi dengan system pasang batu, Pembangunan prasarana irigasi untuk Tahun Anggaran 2003 hanya 9 % dari total pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan. Salah satu faktor penyebab hal ini karena masih adanya kebutuhan pembangunan jalan yang masih sangat tinggi terutama pada jalan desa ataupun jalan lingkungan. Dan adanya pemahaman apabila prasarana jalan belum baik maka dapat dikategorikan desa yang belum maju karena sulit dijangkau terutama pada saat musim hujan. Juga dimungkinkan masih sedikit masyarakat petani yang bersedia menjadi anggota TID, terutama pada desa baru. Padahal pada saat sosialisasi Kabupaten telah ditekankan bahwa pembangunan prasarana irigasi dapat diprioritaskan, mengingat sudah banyak kucuran dana pada desa yang dialokasikan untuk pembanguan jalan.

b. Pasar.

Pasar sebagai tempat berlangsungnya jual beli barang merupakan salah satu unsur pokok dalam perkembangan perekonomian disuatu tempat atau daerah. Keberadaan pasar juga akan mempercepat berkembangnya roda kehidupan, seperti pemukiman, jasa angkutan dan jasa yang lain. Tentunya keberadaan pasar dimaksudkan disini adalah pasar yang cukup representatif guna transaksi jual beli semua komponen penggunaanya baik itu pedagang maupun pembeli. Manfaat yang diberikan dibangunnya pasar meliputi :

- 1) Semakin tumbuh dan berkembangnya roda perekonomian yang telah ada, yang tentunya akan memberikan tambahnya pendapatan atau keuntungan bagi pelaku-pelakunya.
- 2) Semakin tumbuh dan berkembangnya pemukiman disekitar pasar.
- 3) Semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian di sektor jasa di kawasan pasar.
- 4) Semakin tingginya kesadaran memiliki dan melestarikan serta membangun diri masyarakat dan perangkat desa.
- 5) Kemauan untuk pemihakan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dari perangkat desa dan masyarakat dengan disiapkannya los pasar dengan sewa yang murah.
- 6) Pembelajaran pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat desa. Ditunjukkan dengan kesadaran menyewa untuk pemakaian fasilitas pasar baik kios maupun los, yang nantinya akan dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan pasar.

- 7) Pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat, ditunjukkan dalam penetapan penyewa fasilitas pasar beserta dana kompensasinya dilaksanakan secara terbuka, transparan dan fair. Keputusan penetapan organisasi pengelola pasar beserta anggota, serta AD/ART-nya juga dilakukan secara terbuka transparan dan fair.
- 8) Jauh kedepan diharapkan langkah kecil ini menjadi awal dari tumbuh dan berkembangnya pasar pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.

c. Jembatan

Jembatan sebagai sarana penghubung dua daerah yang terpisahkan oleh aliran sungai juga sangat dibutuhkan. Apabila merupakan salah satu akses yang mempersingkat jalan masuk kesuatu wilayah. Dan pada umumnya pembangunan jembatan berkesinambungan nantinya dengan pembangunan jalan. Karena jembatan yang dibangun, kondisi jalan kanan kiri jembatan masih jalan makadam. Prosentase pembangunan jembatan untuk Program P2MPD T.A 2003 hanya 40 % dari total pembangunan prasarana. Dan prioritas pembangunan ini oleh masyarakat desa telah dinantikan bahkan ada yang telah mengusulkan bertahun-tahun yang lalu tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Pemda dikarenakan memang keterbatasan dana.

4. Manfaat (*Benefits*)

Indikator manfaat (*Benefits*) yang dianalisa dalam penelitian ini adalah terkait dengan dampak dari Program P2MPD dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintahan, dicirikan dengan dilaksanakan pendekatan partisipatif, perencanaan, monitoring dan Evaluasi (PPME) untuk pembangunan prasaran melalui pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten, Sosialisasi Kecamatan, dan sosialisasi desa, tersusunnya 80 TID 95 paket proyek usulan desa serta terbangunnya 95 paket pekerjaan di 80 desa.
- b. Semakin berdayanya masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- c. Masyarakat lebih mudah dalam memberikan akses dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat lebih meningkat perekonomiannya.
- d. Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum.
- e. Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pembangunan, dicirikan adanya komunikasi dua arah antara kabupaten, Kecamatan, desa dengan masyarakat.
- f. Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk beran aktif dalam pembangunan daerah dilihat dari ;
 - o Ikut sertanya masyarakat desa dalam pembangunan
 - o Menguatnya kapasitas/kemampuan warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - o Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan, dicirikan dengan dilaksanakannya sosialisasi desa dan lokarya TID yang dihadiri masyarakat dan anggota tim inti desa.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisa Hasil Penelitian difokuskan pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten yang dihasilkan dari masukan (*Inputs*), Keluaran (*Outputs*), Hasil (*Outcomes*) dan Manfaat (*Benefits*), meliputi : Faktor Penghambat dan pendukung serta dampak dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten :

1. Faktor Penghambat yang mempengaruhi evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten

a. Persiapan

Dari 67 desa penerima dana P2MPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003 adalah desa yang baru menerima program dengan pemahaman proyek dan SDM yang kurang, sementara waktu pelaksanaan proyek sangat singkat dan 4 dari 16 fasilitator P2MPD Kabupaten Klaten TA 2003 adalah fasilitator baru dengan pemahaman proyek sangat singkat juga desa penerima dana P2MPD sebagian baru. Dalam kegiatan persiapan kendala penghambat kegiatan evaluasi P2MPD di Kabupaten Klaten terdiri dari :

1) Sosialisasi P2MPD

Ada beberapa kecamatan dengan jumlah desa penerima dana P2MPD hanya sedikit (2 desa) sehingga dirasa kurang efisien untuk melaksanakan sosialisasi kecamatan sendiri. Dan Belum adanya pemahaman dari desa-desa baru penerima program tentang system tatacara maupun mekanisme Program P2MPD. Adanya 65 desa dengan dana murni APBD dan 15 desa proposional APBD dan Loan dengan proses pencairan dana yang berbeda..

2) Orientasi Desa

Tidak semua desa mempunyai data monografi yang representatif (kurang lengkap dan atau tidak up to date)

3) Lokakarya.

Proposal desa yang telah dibuat belum sesuai standart teknis dan biaya, data pendukung yang menunjukkan telah diadakannya lokakarya masih kurang serta belum tampak adanya peran aktif perempuan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan.

4) Proses Verifikasi Proposal Tim Inti Desa.

Adanya keterbatasan waktu dari semua anggota tim untuk dapat terlibat aktif dalam setiap proses verifikasi setiap harinya.

b. Pelaksanaan

1) Kemajuan Fisik, adanya beberapa desa pada awal bulan, kemajuannya fisiknya kurang menggembirakan mengingat waktu pelaksanaan pada pelaksanaan pada pertengahan bulan fisiknya harus 100 %.

2) Kuantitas waktu kerja tenaga kerja sehubungan waktu bulan puasa, ini terjadi pada beberapa desa yang prestasi kemajuan fisiknya tertinggal padahal pada bulan November ini TID harus mengejar ketertinggalan kemajuan fisik tersebut sehingga pada waktu yang telah ditentukan dapat selesai 100 %.

3) Lokasi pembangunan berbatasan dengan desa lain, adanya kesepakatan untuk bersama-sama mendukung penyelesaian satu paket pekerjaan,

karena masih menunggu dana tahap III sehingga pekerjaan tidak dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan.

c. Administrasi Desa.

Sebagain besar desa sampai dengan akhir bulan November belum menyelesaikan administrasi dengan baik (sesuai dengan petunjuk Teknis Administrasi) batas waktu yang yang ditentukan, sehingga proses pencairan dana desa penerima program belum terealisasi 100 %.

d. Pencairan Dana Desa

- 1) Pencairan dana desa, banyaknya keluhan dari masyarakat desa tentang lamnya proses pencairan dana, terutama untuk desa dengan dana proporsional APBD dan Loan.
- 2) Walaupun Dana telah masuk ke rekening TID namun proses pencairan dana desa masih memerlukan penanganan khusus dikarenakan masih adanya lampiran pembayaran SSP Pph dan PPN sebagai bukti pembayaran pajak untuk dapatnya TID mencairkan dana.
- 3) Pencairan dana loan dapat dilaksanakan sesudah adanya lampiran SPMU APBD dan lampiran lainnya yang harus dibuat oleh Benpro.
- 4) Masih adanya kesalahan penulisan huruf dan angka pada dokumen pencairan dana desa penerima dana loan.
- 5) Karena adanya libur bulan puasa, proses pencairan diakhiri tanggal 22 November 2003 dan baru dimulai kembali tanggal 1 Desember 2003.
- 6) Waktu proses pencairan dana APBD yang memerlukan waktu yang cukup lama walaupun dokumen pencairan sudah lengkap. Hal ini maka secara

tidak langsung akan berpengaruh pada proses pencairan dana desa penerima BLN.

- 7) Adanya keterbatasan tenaga yang membantu Benpro dalam proses administrasi pencairan dana dan Benpro saat ini termasuk yang baru menangani program P2MPD, dimana Program P2MPD telah menginjak tahun ke tiga dalam pelaksanaannya..

e. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Keterlambatan pencairan dana di Tingkat Desa sehingga agak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat.
- 2) Berkas-berkas arsip pelaksanaan kegiatan sosialisasi, lokarya, proposal kadang tidak dipegang oleh satu orang TID sehingga agak menyulitkan bila konfirmasi/klarifikasi mengenai pelaksanaan program.
- 3) Administrasi pelaporan Tim Pelaksana, Tim Monev, Tium OP serta laporan keuangan masih belum lengkap.
- 4) Sosialisasi pelaksanaan dan sistematika OP belum maksimal dilaksanakan oleh TID kepada masyarakat pengguna.
- 5) Adanya beberapa desa yang kurang mampu memahami pentingnya pemasangan papan informasi dan papan nama proyek sebagai wahana informasi dan transparansi karena terkesan TID lamban dalam menindaklanjuti hal diatas walaupun pada akhirnya terpasang terutama papan nama proyek
- 6) Dokumen yang menunjukkan adanya proses yang harus dilalui seperti Sosialisasi desa, lokarya desa umumnya ada dan lengkap hanya nantinya

perlu adanya arsip untuk Kepala Desa, untuk kemudahan bilamana ada pemeriksaan sewaktu waktu dari pihak yang berkompeten.

- 7) Belum maksimalnya pelibatan dan keterlibatan warga miskin dalam keanggotaan TID karena rata-rata jumlah warga miskin yang menjadi anggota berkisar 5 – 7 orang.
 - 8) Adanya papan informasi dan papan nama proyek belum terealisasi di beberapa desa yang dikunjungi.
 - 9) Kemajuan fisik di beberapa desa mengalami keterlambatan.
 - 10) Proses pencairan dana desa tidak seirama dengan fisik pekerjaan. Ada beberapa desa yang fisiknya sudah 100 % baru menerima dana tahap II.
 - 11) Sistem OP sebagai salah satu unsure keberlanjutan program yang menjadi tanggungjawab TID menjadi rancu karena adanya Berita Acara serah terima pekerjaan TID kepada Pimpro.
2. Faktor Pendukung yang menjadikan tindak lanjut dari faktor penghambat evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten sehingga faktor-faktor penghambat dari program bisa teratasi yang meliputi :
- a. Persiapan
 - 1) Pra Orientasi dan sosialisasi baik oleh KMD maupun fasilitator, untuk penyiapan desa sebelum pelaksanaan sosialisasi kabupaten dan jua dilakukan pelatihan ke P2MPD-an bagi fasilitator baru dan penyegaran kembali bagi fasilitator baru oleh KMD.

- 2) Diperkenankan sosialisasi kecamatan untuk 2 atau lebih kecamatan dalam satu kegiatan, satu waktu, satu tempat juga diberikan penjelasan rinci tentang setiap tahap kegiatan P2MPD.
- 3) Untuk memudahkan proswes pencairan dana APBD murni dikelompokkan, sementara untuk dana loan diproses satu-persatu.
- 4) Memfasilitasi Sekretaris Desa untuk menginventarisasi dan melengkapi data yang ada dan yang kurang juga bilamana perlu didampingi ke kecamatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 5) Memberikan penanganan intensif terhadap TID mengenai persyaratan-persyaratan seperti yang tertuang dalam juklak/juknis.
- 6) Melalui Fasilitator TID harus melengkapi data-data yang dibutuhkan. Juga diberikannya pemahaman secara intens bahwa semua anggota TID mempunyai kedudukan yang sama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- 7) Standard pelaksanaan Verifikasi memakai acuan yang telah disepakati. Minimal dalam proses verifikasi harus ada staf teknis PU dan KMD juga apabila ada hal-hal yang masih meragukan yang tertuang dalam proposal desa maka dihadirkan TID didampingi fasilitator untuk menjelaskan hal-hal yang masih meragukan serta hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan diketahui oleh Anggota Verifikasi.

b. Pelaksanaan.

- 1) Untuk kemajuan fisik KMD memberikan penegasan kepada TID bahwa pekerjaan yang dilaksanakan bersifat kontraktual dimana harus selesai

waktu yang ditetapkan didalam SP3 sehingga TID harus segera melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan percepatan kemajuan fisik pekerjaan sehingga sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SP3, Dalam hal ini KMD juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

- 2) Mengenai kuantitas waktu kerja tenaga kerja sehubungan bulan puasa, diberikan penjelasan bahwa pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu dimana diharapkan waktu pelaksanaan ibadah puasa tidak mengganggu penyelesaian fisik pekerjaan. TID harus melakukan kiat-kiat khusus yang memungkinkan pelaksanaan ibadah puasa dan penyelesaian fisik terganggu dengan melakukan pendekatan mengenai pelaksanaan waktu pekerjaan di malam hari.
- 3) Untuk lokasi pembangunan berbatasan dengan desa lain, KMD bersama fasilitator memberikan pengarahan kepada TID bahwa proyek harus segera dapat dimanfaatkan.

c. Administrasi Desa

KMD menekankan kepada TID bahwa pembukuan administrasi merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program kepada masyarakat desa dan merupakan salah satu upaya pemberdayaan dalam bidang administrasi. Hal ini ini nanti akan dituangkan dalam dokumen laporan akhir desa dan kemudian di copi dalam beberapa rangkap. Ketepatan waktu pengadministrasian akan lebih memperlancar pelaksanaan program terutama pencairan dana tahap berikutnya.

d. Pencairan dana

- 1) KMD melakukan koordinasi dengan Pimpro, Benpro, Kasda maupun Bank BPD Jateng cabang Klaten untuk dapat mempercepat proses pencairan dana apabila telah sesuai yang telah dipersyaratkan dalam juklak. KMD membantu Benpro dalam proses terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pencairan dana.
- 2) Keterlambatan proses pencairan dana di Kasda juga mempengaruhi proses pencairan dana BLN melalui KPKN Klaten. KMD membantu Benpro dalam proses terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pencairan dana juga dilakukan koordinasi dengan KPKN.
- 3) KMD membantu/memfasilitasi Benpro terhadap proses pembuatan SSP Pph dan PPN dan terhadap proses yang berkaitan dengan pencairan dana.
- 4) KMD melakukan koordinasi dengan Benpro baru dalam penyiapan dan pembuatan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Pencairan dana BLN. KMD juga melakukan fasilitasi TID melalui fasilitator terhadap upaya koreksi kesalahan tersebut.
- 5) KMD juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program P2MPD untuk dapat terjalinnya komunikasi/konfirmasi terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan tersebut dan kemudian untuk ditemukan solusinya. Untuk penanganan administrasi pencairan dana KMD melakukan koordinasi dengan UPP – Pimpro, Benpro, juga koordinasi dengan Kasda untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini.

- 6) KMD juga berkordinasi dengan KPKN kemudian diambil solusi untuk mempercepat proses pencairan dana dana BLN yaitu dokumen desa-desa penerima BLN dapat dimasukkan ke KPKN untuk diperiksa terlebih dahulu sambil menunggu dana APBD air dan kelengkapan dokumren lainnya. KMD memfasilitasi membantu dalam pembuatan SSP PPN maupun PPh.

e. Monitoring dan Evaluasi.

- 1) Memberikan pemahaman bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak harus berupa uang tunai, karena sumbangan tenaga kerja juga merupakan wujud partisipasi masyarakat. Dan dalam program ini tidak boleh ada paksaan dalam memperoleh swadaya masyarakat. Kesadaran masyarakat akan muncul dengan sendirinya bila program yang dilaksanakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
- 2) Menyarankan kepada TID supaya penyimpanan arsip/dokumen administrasi desa terutama yang terkait dengan program P2MPD dilakukan pada satu orang anggota TID dan kepala desa juga diberikan hasilnya. Melalui fsilitator ditekankan bahwa pelaporan yang dibuat oleh Tim Pelaksana, Tim Monev, Tim OP harus sesuai dengan petunjuk administrasi yang elah disampaikan kepada TIM penerima program P2MPD.
- 3) Ditekankan kepada TID bahwa unsure transparansi merupakan salah satu unsur program P2MPD. Dimana masyarakat dapat mengetahui informasi

perkembangan pelaksanaan program P2MPD di deasnya masing-masing.

Pada akhirnya masyarakat dapat menilai sendiri hasil pelaksanaan program.

- 4) Memberikan penegasan kepada TID bahwa semua dokumen yang pada akhirnya harus disatukan dalam suatu dokumen laporan akhir desa dan dicopi beberapa rangkap. Dan sebaiknya arsip desa dipegang salah satu anggota TID untuk kemudahan bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.
- 5) Memaksimalkan keterlibatan warga miskin untuk masuk menjadi TID. Namun mereka banyak yang tidak bersedia untuk menjadi anggota TID, kekawatiran mereka bahwa sudah susah mencari penghasilan setiap harinya, sehingga takut tidak sanggup memikul tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Namun telah diupayakan bahwa orang yang duduk dalam keanggotaan TID merupakan representasi dari cluster miskin tersebut. Sehingga jenis prasarana yang nantinya dimunculkan betul-betul prasarana yang sangat dibutuhkan dan bersinggungan dengan kebutuhan warga miskin.
- 6) Diharapkan dapat memasang papan nama proyek dengan batas waktu yang telah ditentukan telah terpasang, dan keterlambatan kemajuan fisik untuk dapat segera selesai 100 %. Diharapkan agar program ini diprioritaskan kecepatan pencairan dana. Kordinasi dengan pihak terkait dalam proses pencairan dana ini selalu dilakukan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Dampak dari Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten

- a. Semakin tumbuh dan berkembangnya roda perekonomian yang telah ada, yang tentunya akan memberikan tambahnya pendapatan atau keuntungan bagi pelaku-pelakunya.
- b. Semakin tumbuh dan berkembangnya pemukiman disekitar pasar.
- c. Semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian di sector jasa.
- d. Semakin tingginya kesadaran memiliki dan melestarikan serta membangun diri masyarakat dan perangkat desa.
- e. Kemauan untuk pemihakan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dari perangkat desa dan masyarakat dengan disiapkannya los pasar dengan sewa yang murah.
- f. Pembelajaran pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat desa. Ditunjukkan dengan kesadaran menyewa untuk pemakaian fasilitas pasar baik kios maupun los, yang dananya nanti akan dipergunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan pasar.
- g. Pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat, ditunjukkan dalam penetapan penyewa fasilitas pasar beserta dana kompensasinya dilaksanakan secara terbuka, transparan dan fair. Keputusan penetapan organisasi pengelola pasar beserta anggota, serta AD/ART-nya juga dilakukan secara terbuka transparan dan fair.
- h. Jauh kedepan diharapkan langkah kecil ini menjadi awala dari tumbuh dan berkembangnya pasar pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.

- i. Sarana penghubung dua daerah yang terpisahkan oleh aliran sungai merupakan salah satu akses yang mempersingkat jalan masuk kesuatu wilayah.
- j. Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintahan, dicirikan dengan dilaksanakan pendekatan partisipatif, perencanaan, monitoring dan Evaluasi (PPME) untuk pembangunan prasaran melalui pelaksanaan Sosialisasi Kabupaten, Sosialisasi Kecamatan, dan sosialisasi desa, tersusunnya 80 TID 95 paket proyek usulan desa serta terbangunnya 95 paket pekerjaan di 80 desa.
- k. Semakin berdayanya masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
- l. Masyarakat lebih mudah dalam memberikan akses dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat lebih meningkat perekonomiannya.
- m. Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasaran umum.
- n. Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pembangunan, dicirikan adanya komunikasi dua raga antara kabupaten, Kecamatan, desa dengan masyarakat.
- o. Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk peran aktif dalam pembangunan daerah.
- p. Menguatnya kapasitas/kemampuan warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- q. Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan.

Dari Hasil Penelitian yang difokuskan pada pelaksanaan Program Dapat Dapat disimpulkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten yang dihasilkan dari masukan (*Inputs*), Keluaran (*Outputs*), Hasil (*Outcomes*) dan Manfaat (*Benefits*), meliputi : Faktor Penghambat dan pendukung serta dampak dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan P2MPD dari Tahun 2001 sampai dengan 2003 dapat dianalisa bahwa secara umum pelaksanaan program P2MPD sudah berjalan tetapi masih banyak banyak kendala/penghambat yang harus di tindaklanjuti demi keberhasilan program , sehingga dalam pelaksanaannya dan dampak yang dihasilkan dari Program P2MPD dpat secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat penerima program.

D. Diskusi.

1. Konsep Teori

Menurut David C. Korten, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada hubungan erat atau sinergi (kesesuaian) antara :

- a. Kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program
- b. Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
- c. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Menurut Gunawan (1999 : 138) Indikator keberhasilan Program untuk mengukur pelaksanaan Program adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok lain dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Menurut William Dunn (1999:610) kriteria evaluasi terdiri dari berbagai tipe yaitu sebagai berikut :

- a. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari diadakannya tindakan.

- b. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.

c. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tindakan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Kesamaan

Erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan.

e. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan preferensi. Kriteria ini penting, karena analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria diatas, masih dianggap gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Kriteria yang dipilih karena dianggap penting untuk dijawab pada Evaluasi Program P2MPD ini adalah : *Efektivitas*, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?, *Efisiensi*, yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?, *Ketepatan*, yaitu apakah hasil telah yang diinginkan benar-benar

bernilai?, dan *Responsivitas*, yaitu apakah hasil telah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?

Evaluasi terhadap kebijakan seringkali tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak seperti yang diharapkan, hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi. Menurut Islamy (1997:117), kendala penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, dan waktu, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. Kebanyakan program-program pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana.
- b. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara yang akan mengurangi tercapainya dampak yang diharapkan.
- c. Problema-problema publik seringkali timbul karena berbagai macam faktor dan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
- d. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi dampaknya.
- e. Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- f. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
- g. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
- i. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Menurut Bryant and White (1987:200-201) merumuskan empat kendala dalam melakukan penelitian evaluasi :

- a. Evaluasi menjadi suatu ancaman karena mudah digunakan sebagai sarana mengkritik orang lain atau mengungguli kekuasaan lain.
- b. Kendala ekonomis, bahwa ekonomi yang baik itu mahal dari segi waktu dan uang, dan supaya tersedia banyak data tidak selalu sepadan dengan tingginya biaya tersebut.
- c. Kendala teknis dimana penanganan data sering menuntut adanya staf yang terlatih dan tersedianya kemampuan pengolahan data, termasuk waktu suatu fakta.
- d. Kendala politis, bahwa hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, tetapi juga secara politis memalukan jika diungkapkan. Seharusnya evaluasi dipandang sebagai bagian dari proyek, bukan mengidentifikasikan diri dengan kebijakan atau rancangan proyek tertentu, sehingga evaluasi menjadi bagian dari suatu proses belajar yang sedang berlangsung dan bukan sebagai suatu ancaman.

2. Analisa.

Dari beberapa beberapa temuan dari pelaksanaan Program P2MPD Kabupaten Klaten yang diformulasikan dari beberapa teori tersebut diatas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) masih banyak kendala yang harus segera ditindaklanjuti baik Pelaksanaan (Kemampuan Pelaksanaan), SDM, Penerima Program, keberlanjutan program dll, sehingga program P2MPD secara nyata dampak dari program dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk keberhasilan program, dapat berhasil dengan baik apabila program itu :

- a. Sesuai dengan kebutuhan dari penerima program.
- b. Kemampuan Organisasi Pelaksana Program
- c. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.
- d. Berkurangnya penduduk miskin
- e. Meningkatnya pendapatan penduduk miskin
- f. Meningkat kepedulian masyarakat
- g. Meningkatnya kemandirian masyarakat
- h. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.
- i. Efektifitas program menunjukkan pada tingkat pencapaian.
- j. Efisien berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- k. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tindakan efektifitas memuaskan kebutuhan penerima program.
- l. Mampu mengatasi kendala dari sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, dana, material dan waktu.
- m. Mampu mengatasi kesalahan dan pengadministrasian kebijakan-kebijakan program.

3. Rekomendasi

- a. Sebagai salah satu sasaran Pokok Program P2MPD warga masyarakat miskin dan perempuan penerima manfaat yang sangat besar dengan dilibatkannya mereka secara langsung dalam proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta operasional pemeliharaan proyek pembangunan sehingga pelaksanaan program tidak salah sasaran.
- b. Dalam Pengadministrasian perlu adanya tenaga khusus ataupun pelatihan dari Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten untuk Tim Inti Desa sehingga pelaksanaan bisa lancar dan tertib administrasi.
- c. Koordinasi baik dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagai Proses pemberdayaan, manajemen partisipatif, pembangunan :bottom up”,
- d. Proses pembangunan, baik dari perencanaan proyek berdasarkan skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi pemeliharaan operasional, administrasi proyek dan proses keuangan.
- e. Tindaklanjut dari program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di Kabupaten Klaten perlu ditindaklanjuti sebagai kelanjutan program baik dana maupun pemeliharaan sarana.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN.

1. Manfaat Program P2MPD

Sebagai salah satu sasaran Pokok Program P2MPD warga masyarakat miskin dan perempuan penerima manfaat yang sangat besar dengan dilibatkannya mereka secara langsung dalam proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta operasional pemeliharaan proyek pembangunan. Secara umum Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat desa Kabupaten Klaten sudah mulai mengerti, memahami dan melaksanakan :

- a. Proses pemberdayaan, manajemen partisipatif, pembangunan "bottom up", alih teknologi dan berkesinambungan.
- b. Proses pembangunan, baik dari perencanaan proyek berdasarkan skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi pemeliharaan operasional, administrasi proyek dan proses keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas KMD

Secara umum KMD sebagai motor, fasilitator dan motivator telah melaksanakan semua tugas-tugas berdasarkan pedoman umum, secara internal KMD telah mengadakan pelatihan, penajaman materi dan koordinasi dengan fasilitator. Koordinasi dan pendampingan juga telah dilakukan KMD kepada TKK, UPP, bendahara proyek, KPL, Camat dan Tim Inti Desa. Pemihakan kepada masyarakat miskin dan perempuan sebagai nafas dan sasaran Program P2MPD juga telah dilaksanakan oleh KMD.

3. Pelaksanaan Program P2MPD

- a. Proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta operasional pemeliharaan partisipatif telah terlaksana dengan baik sesuai mekanisme yang ada dan terdomentasi dengan baik dan lengkap.
- b. Telah dibangun 95 paket pekerjaan di 80 desa pada 18 kecamatan yang terdiri dari 4 ruang lingkup.
- c. Pelaksanaan fisik dan administrasi mengalami perbaikan yang menggembirakan dan telah terealisasi lengkap.
- d. Partisipasi masyarakat miskin telah terakomodasi. Prasarana yang dibangun berpihak kepada kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- e. Partisipasi dan peran serta perempuan dalam setiap tahap kegiatan juga semakin kuat.
- f. Proses pencairan dana berlangsung lancar walaupun ada kendala dalam prosesnya namun telah dapat daintisipasi dan telah berakhir pada bulan Desember 2003.
- g. Seluruh desa telah menetapkan organisasi dan mekanisme pemeliharaan dengan biaya dari pihak desa dan iuran pemanfaatn proyek.

4. Permasalahan dan Penanganan

Permasalahan dan Tindak lanjut penanganan pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dilakukan secara koordinasi melibatkan unit-unit organisasi pelaksana program dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa tergantung pada bobot permasalahan yang ada. Bentuk penanganan terhadap

masalah yang terjadi dilaksanakan melalui koordinasi berkala, rapat koordinasi khusus maupun dengan kunjungan lapangan.

5. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan

- a. Kinerja pengelola proyek dari tingkat kabupaten sampai dengan desa sudah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik. Perbaikan dalam hal koordinasi dan penyiapan pendanaan sangat diharapkan.
- b. Partisipasi dan peran serta perempuan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek baik sebagai anggota Tim Inti Desa maupun sebagai tenaga kerja sudah mengalami peningkatan. Keberlanjutan dan peningkatan partisipasi dan peran serta perempuan sangat diharapkan dimasa mendatang.
- c. Partisipasi dan peran serta masyarakat miskin dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek baik sebagai anggota TIM Inti Desa maupun sebagai tenaga kerja cukup besar. Kebutuhan akan prasarana dasar sudah dibangun dan dilengkapi. Keberlanjutan dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat miskin serta penyediaan prasaran dasar umum sangat diharapkan di masa mendatang.
- d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur TKK, UPP, Pimpro dan KMD dengan melakukan kunjungan lapangan, namun frekuensinya diharapkan telah meningkat.
- e. Dengan adanya Petunjuk Teknis telah banyak membantu desa dalam menyusun proposal dan memudahkan Tim Kabupaten dalam menverifikasi

proposal. Kualitas pekerjaan masyarakat menjadi jauh lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis.

- f. Partisipasi dan keaktifan Tim Inti Desa mengalami perkembangan yang mengembirakan, Pengertian, pemahaman serta kemauan dalam menjalankan tugas mengalami peningkatan demikian pula dalam menyusun administrasi pelaporan.
- g. Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Program P2MPD Kabupaten Klaten T.A 2003 merupakan saran komunikasi (dengan pendapat) yang baik antara semua komponen proyek baik dari unsur pemeran program maupun unsur non pemeran program. Hasil dari lokarya merupakan umpan balik bagi penyempurnaan program pembangunan sejenis atau lainnya, baik sekarang maupun masa mendatang.

B. SARAN

1. Perencanaan dan Persiapan Program.

- a. Penetapan lokasi calon penerima didasarkan pada jumlah penduduk miskin dan minimnya prasarana dasar umum, dengan mengacu pada Pedoman Umum dan dilakukan secara transparan, sehingga lebih dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- b. Pengertian, pemahaman dan kesadaran dari semua pihak (Eksekutif, Legislatif dan masyarakat) agar penetapan lokasi penerima program didasarkan pada acuan yang ada, dan bukan dengan pemerataan, apalagi dengan dasar politis.

2. Pelaksanaan Program.

- a. Perlunya adanya ruang khusus sebagai ruang kesekretariatan sehingga kegiatan proses administrasi selama program ini berlangsung dapat berjalan secara selektif. Dan perlunya tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi.
- b. Kedisiplinan mematuhi Rencana Kerja Kabupaten perlu ditingkatkan di semua komponen pelaksanaan proyek, sehingga diharapkan akan didapat hasil yang lebih optimal.
- c. Pengaktifan monitoring dan evaluasi oleh TKK dan UPP secara periodik sebagai sarana jemput bola terhadap pelaksanaan di lapangan beserta kendala termasuk pemecahannya.
- d. Peningkatan sosialisasi dan kampanye kepedulian publik oleh TKK, UPP, Pimpro, KMD, fasilitator dan perangkat kecamatan serta desa di setiap kegiatan yang dihadiri.
- e. Mengaktifkan forum dengar pendapat beserta penyempurnaan sistemnya, sehingga akan lebih mampu menampung aspirasi keluhan dan permasalahan dari masyarakat sehingga akan didapatkan pemecahan dan tindaklanjutnya.
- f. Penyadaran dan koordinasi terhadap semua yang terlibat dalam proses pencairan dana akan tugas dan fungsinya beserta kewajibannya sehingga akan lebih memperlancar arus pencairan dana.
- g. Peran KPL lebih ditingkatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program, terutama dalam kelancaran arus pelaporan dari desa.

- h. Peran serta aktif dari perempuan harus dijaga dan dikembangkan dengan diberikan ruang dan kesempatan lebih luas dalam setiap tahapan program.

3. Keberlanjutan Program

Sebagai sebuah program pemberdayaan, yang bertujuan mengubah dan memperbaiki perilaku sosial masyarakat kearah yang lebih baik, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak akan cukup dilakukan dalam waktu yng singkat. Untuk itu kucuran dana sebagai sumber kelanjutan program ini masih sangat dibutuhkan untuk tahun-tahun mendatang, baik itu bersumber dari dana APBD, APBN, maupun Bantuan Luar Negeri (Loan).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro ;

BAPPENAS, 2001, *Pedoman Umum Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)* ;

Briyant, Coralie and White, Louise, G, 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, terjemahan oleh Rusyanto, LP3ES ;

David C Korten, *Pembangunan Yang Memihak Rakyat Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*, Lembaga Studi Pembangunan ;

David C Korten & Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia ;

Davis, Keith, 1975, *Human Relations in Bussines*, Mc Graw Hill Book Co. Inc, New York ;

Gray, Clive, et. Al, 1993, *Pengantar Evaluasi Proyek*, Gramedia, Jakarta ;

Langhein, Laura Irwin, 1980, *Discovering Whether Programs Work: For Guide to Statistical Methods for Program Evaluation*, Scoot Foresman Company, Glenview, Illinois ;

Moelong, Lexy, J, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT. Wijaya Karya (Persero) divisi Bangunan dan Gedung Remaja Rosdakarya

Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar ;

Mubyarto, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media.

Suharyanto, 1996, *Evaluasi Proyek USEP-FKM*, Laporan Penelitian FISIPOL UGM

Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, PT. Wijaya Karya (Persero) divisi Bangunan dan Gedung Gramedia Pustaka Utama ;

Wibowo, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Intermedia ;

William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjahmada University Press